



**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN,
KESEHATAN DAN INVESTASI SWASTA TERHADAP INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA DI WILAYAH BAKORWIL V
PROVINSI JAWA TIMUR.**

SKRIPSI

Oleh:

**Julio Dwi Surya Aditya
130810101156**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2019**



**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN,
KESEHATAN DAN INVESTASI SWASTA TERHADAP INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA DI WILAYAH BAKORWIL V
PROVINSI JAWA TIMUR.**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ekonomi Pembangunan (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

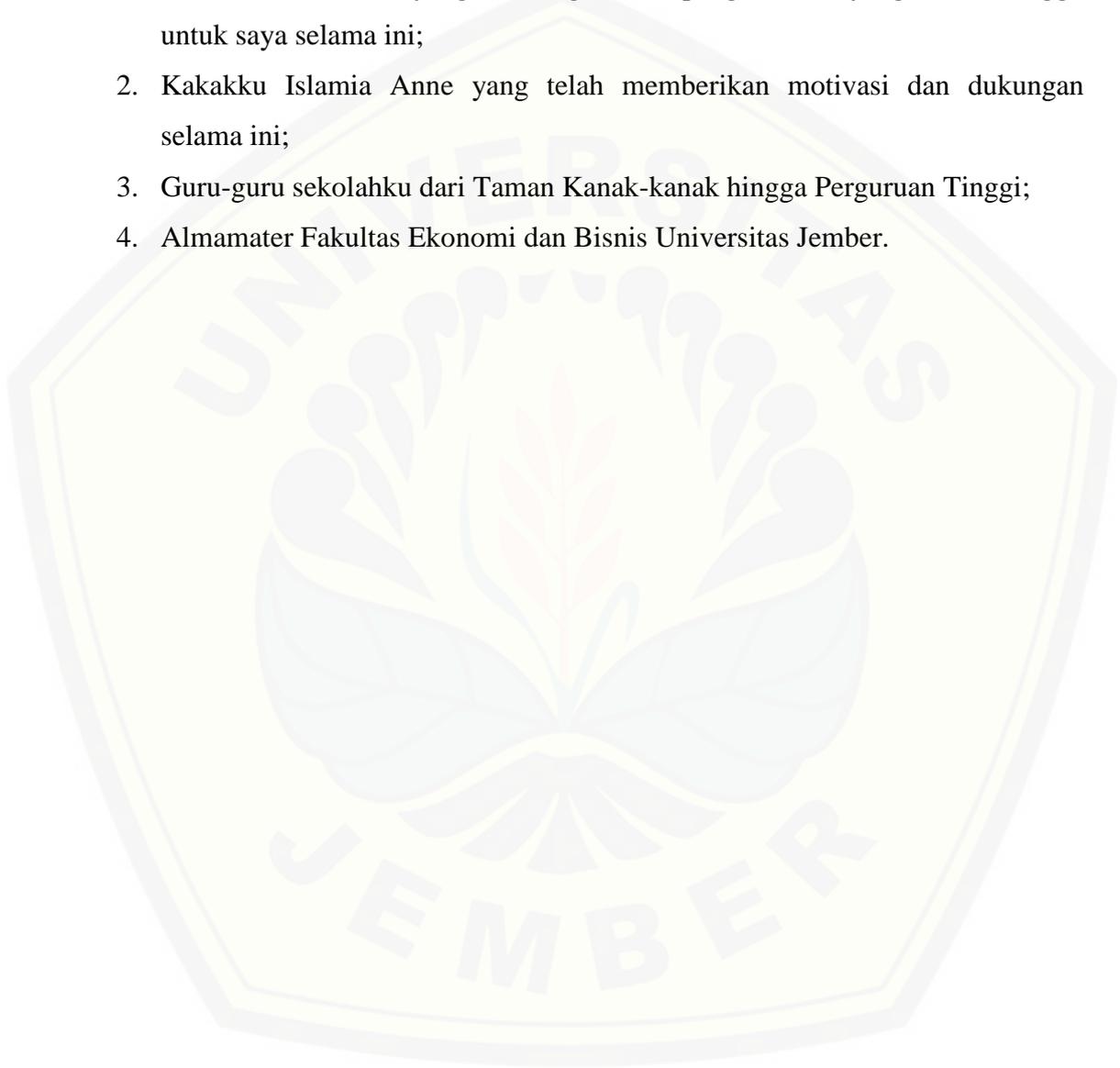
**Julio Dwi Surya Aditya
130810101156**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2019**

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Ayahanda Ngatmaridan Ibunda Mudjiatitercinta atas segala dukungan baik dalam doa, kasih sayang, semangat, dan pengorbanan yang tak terhingga untuk saya selama ini;
2. Kakakku Islamia Anne yang telah memberikan motivasi dan dukungan selama ini;
3. Guru-guru sekolahku dari Taman Kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi;
4. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.



MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kemampuannya”
(QS. Al-Baqarah: 286)



“Mulailah dari tempatmu berada. Gunakan yang kau punya.
Lakukan yang kau bisa ”
(Arthur Ashe)

“Bahagia bukan milik dia yang hebat dalam segalanya, namun dia yang mampu
temukan hal sederhana dalam hidupnya dan tetap bersyukur”
(Anonim)

PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Julio Dwi Surya Aditya

NIM : 130810101156

Judul : Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Investasi Swasta Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Wilayah BAKORWIL V Provinsi Jawa Timur.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang benar.

Demikian pernyataan yang saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan.

Jember, 16 Juli 2019

Yang Menyatakan,

Julio Dwi Surya Aditya

NIM. 130810101156

SKRIPSI

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN,
KESEHATAN DAN INVESTASI SWASTA TERHADAP INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA DI WILAYAH BAKORWIL V
PROVINSI JAWA TIMUR.**

Oleh

Julio Dwi Surya Aditya
NIM 130810101156

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dra. Nanik Istiyani, M.Si.

Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Teguh Hadi Priyono, S.E., M.Si.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi: Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Investasi Swasta Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Wilayah BAKORWIL V Provinsi Jawa Timur.

Nama Mahasiswa : Julio Dwi Surya Aditya

NIM : 130810101156

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Ilmu Ekonomi

Konsentrasi : ESDM

Tanggal Persetujuan : 16 Oktober 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra.Nanik Istiyani, M.Si.
NIP. 196106221987022002

Dr. Teguh Hadi Priyono., S.E., M.Si.
NIP. 197002061994031002

Mengetahui,
Koordinator Progam Studi

Dr. Herman Cahyo Diartho, S.E., M.P.
NIP. 1972071319991001

PENGESAHAN

Judul Skripsi

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN,
KESEHATAN, DAN INVESTASI SWASTA DI WILAYAH BAKORWIL V
PROVINSI JAWA TIMUR**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Julio Dwi Surya Aditya

NIM : 130810101156

Jurusan : Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

03 Oktober 2019

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomidan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

1. Ketua : Dr. I Wayan Subagiarta, M.Si. (.....)
NIP .196004121987021001
2. Sekretaris : Dr. Moh. Adenan, M.M. (.....)
NIP.196610311992031001
3. Anggota : Dr. Sebastiana Viphindartin, M.Kes. (.....)
NIP. 196411081989022001

Mengetahui / Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Dekan,

Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak., CA.
NIP 19710727 199512 1001

*PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN,
KESEHATAN DAN INVESTASI SWASTA TERHADAP INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA DI WILAYAH BAKORWIL V PROVINSI JAWA
TIMUR*

Julio Dwi Surya Aditya

Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jember

ABSTRAK

Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur mengalami kenaikan setiap tahunnya, tetapi bila dibandingkan dengan provinsi lainnya, Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur masih tertinggal jauh. Upaya peningkatan IPM di Jawa Timur dilakukan dengan menggunakan instrumen kebijakan fiskal, dimana bidang pendidikan dan kesehatan masuk ke dalam belanja sosial, dan juga investasi swasta. Penelitian ini menggunakan metode *explanatory*, bahwa metode ini berhubungan dengan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, berpengaruh positif dan signifikan. Variabel pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan, berpengaruh positif dan signifikan. Variabel investasi swasta berpengaruh positif dan signifikan. Hal ini menunjukkan apabila pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, dan investasi swasta mengalami peningkatan maka akan meningkatkan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di wilayah Bakorwil V Provinsi Jawa Timur.

Kata Kunci : *IPM (Indeks Pembangunan Manusia), Jawa Timur, Kesehatan, Pendidikan, Investasi Swasta*

*THE INFLUENCE OF GOVERNMENT SPENDING ON EDUCATION,
HEALTH, AND PRIVATE INVESTMENT ON THE HUMAN DEVELOPMENT
INDEX IN THE BAKORWIL V EAST JAVA PROVINCE*

Julio Dwi Surya Aditya

Development Studies Majoring in Economics, Economics and Bussiness Faculty
University Of Jember

ABSTRACT

The Human Development Index in East Java has increased every year, but when compared with other provinces, the Human Development Index in East Java is still far behind Efforts to increase HDI in East Java are carried out by using a fiscal policy instrument, in which the education and health sectors are included in social spending and also private investment. This study uses the explanatory method, that this method is related to between independent variables and dependent variables. Variable government expenditure in education, has a positive and significant effect. Variable government expenditure in the health sector, has a positive and significant effect. Private investment variables have a positive and significant effect. This shows that if government spending in education, health, and private investment increases, it will increase the HDI (Human Development Index) in the Bakorwil V region of East Java Province.

Keyword : HDI (Human Development Index), East Java, Health, Education, Private Investment

RINGKASAN

IPM merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar yang dilihat dari kualitas fisik dan non fisik penduduk. Adapun tiga indikator tersebut, yaitu: 1) Indikator kesehatan, 2) Tingkat pendidikan, dan 3) Indikator ekonomi. Kualitas sumber daya manusia, dapat dilihat dari indeks kualitas hidup/ indeks pembangunan manusia. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Produktivitas yang rendah berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan. Sehingga dengan rendahnya pendapatan menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin. Berikut adalah perkembangan dan pertumbuhan kualitas sumber daya manusia di Indonesia yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Upaya meningkatkan IPM di Jawa Timur dilakukan melalui instrumen kebijakan fiskal, dimana penyediaan pelayanan dasar dilaksanakan melalui mekanisme anggaran. Alokasi anggaran bidang kesehatan masuk dalam kategori belanja sosial. Dalam praktiknya, pemerintah daerah mempunyai kebijakan yang berbeda dalam meningkatkan sumber daya manusianya. Hal ini dapat dilihat pada format penganggaran belanjanya pada bidang kesehatan, sehingga hasil yang diperoleh tiap-tiap daerah berbeda-beda. Kondisi demikian menjadi polemik yang memunculkan perdebatan peran pemerintah yang belum maksimal dalam mensejahterakan masyarakat melalui penerapan kebijakan IPM.

BAKORWIL V merupakan wilayah administratif pemerintahan jaman Hindia Belanda yang berada di Jawa Timur bagian timur yang meliputi Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo dan Kota Probolinggo. Ke tujuh kabupaten tersebut merupakan daerah yang bekerjasama dalam hal pengembangan industri, pengembangan produk daerah dan dalam kegiatan ekonomi lainnya sehingga diharapkan hal tersebut menjadi peluang bagi ke tujuh kabupaten tersebut untuk dapat saling melengkapi antar kabupaten dan dapat

menunjang kekurangan yang ada disetiap kabupaten sehingga akan tercapai pemerataan indeks pembangunan manusia.

Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Banyuwangi, dan Kabupaten Situbondo Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo dan Kota Probolinggo, sudah mulai berkembang, dan dilihat dari potensi-potensi disetiap daerah sangatlah membantu mengembangkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi ini sendiri, tetapi terdapat PDRB dua wilayah yang tertinggal yaitu Kabupaten Bondowoso dan kota Pobolinggo. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi disuatu daerah sangatlah penting karna akan saling mempengaruhi suatu daerah kedaerah yang lainnya, karna penentuan pusat pertumbuhan sangatlah menentukan perkembangan di wilayah BAKORWIL

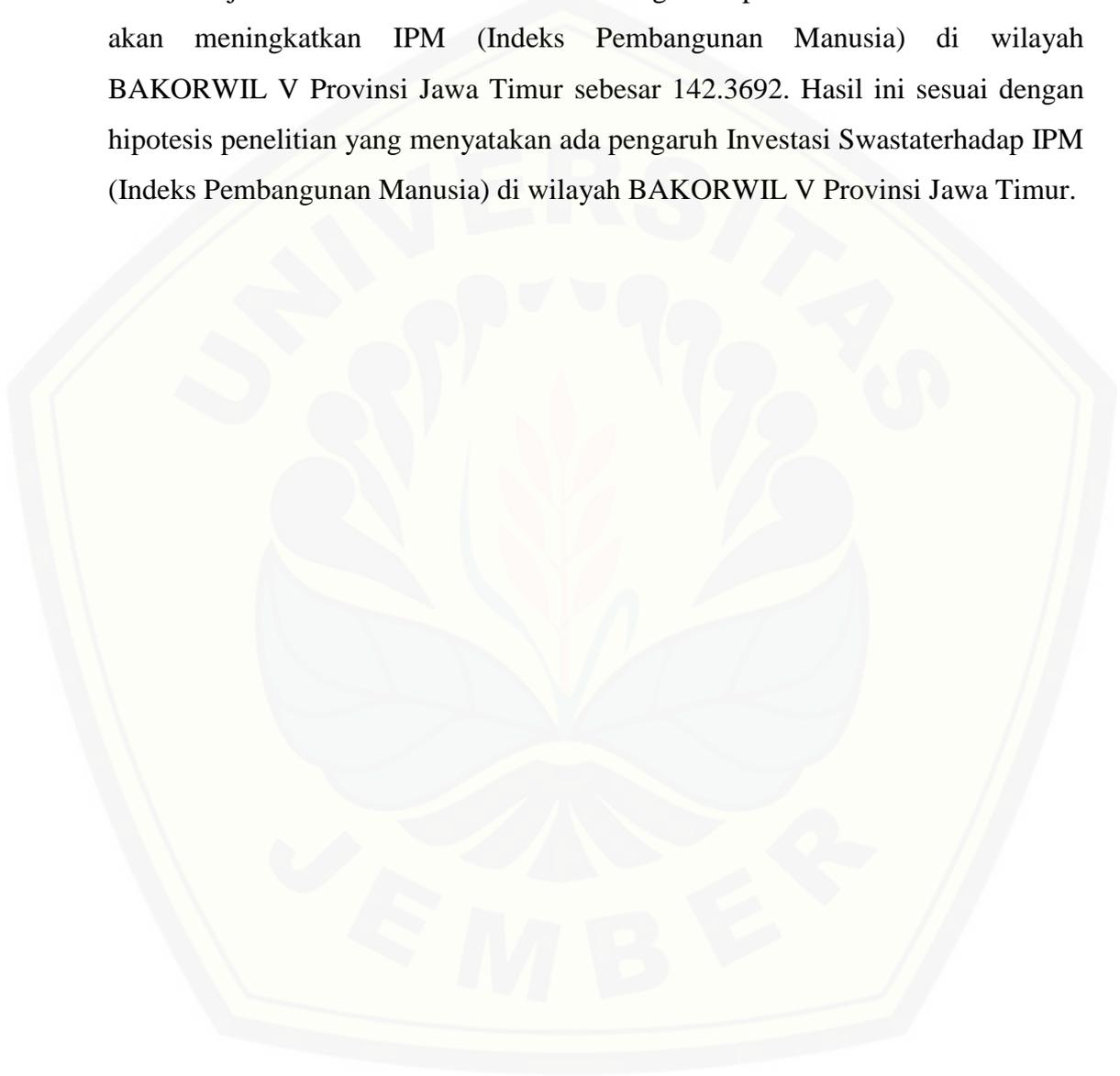
Kegiatan Skripsi di ambil dari data Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang telah disusun dan dipublikasikan. menggunakan metode penelitian *explanatory*, Herjanto (2007:96) menjelaskan bahwa metode ini beranggapan bahwa terdapat hubungan antara variabel bebas (independen) dengan variabel terikat (dependen) yang dipengaruhinya.

Hasil analisis dapat dijelaskan bahwa variabel Pengeluaran Pemerintah di bidang pendidikan berpengaruh positif dan signifikan dengan elastisitas positif sebesar 11.62747. Hal ini menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah di bidang pendidikan mengalami peningkatan sebesar 1% maka akan meningkatkan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di wilayah BAKORWIL V Provinsi Jawa Timur sebesar 11.62747. Hasil ini sesuai dengan hipotesis penelitian yang menyatakan ada pengaruh Pengeluaran Pemerintah di bidang pendidikan terhadap IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di wilayah BAKORWIL V Provinsi Jawa Timur.

Hasil analisis dapat dijelaskan bahwa variabel Pengeluaran Pemerintah di bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan dengan elastisitas positif sebesar 13.97631. Hal ini menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah di bidang kesehatan mengalami peningkatan sebesar 1% maka akan meningkatkan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di wilayah BAKORWIL V Provinsi Jawa Timur

sebesar 13.97631. Hasil ini sesuai dengan hipotesis penelitian yang menyatakan ada pengaruh Pengeluaran Pemerintah di bidang kesehatan terhadap IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di wilayah BAKORWIL V Provinsi Jawa Timur.

Hasil analisis dapat dijelaskan bahwa variabel Investasi Swasta berpengaruh negatif dan signifikan dengan elastisitas positif sebesar 142.3692. Hal ini menunjukkan bahwa Investasi Swasta mengalami penurunan sebesar 1% maka akan meningkatkan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di wilayah BAKORWIL V Provinsi Jawa Timur sebesar 142.3692. Hasil ini sesuai dengan hipotesis penelitian yang menyatakan ada pengaruh Investasi Swasta terhadap IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di wilayah BAKORWIL V Provinsi Jawa Timur.



PRAKATA

Dengan mengucapkan Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “*Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Investasi Swasta Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Wiayah BAKORWIL V Provinsi Jawa Timur*”. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik itu berupa motivasi, nasehat, saran maupun kritik yang membangun. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dra. Nanik Istiyani, M.Si. selaku dosen pembimbing I yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, kritik dan pengarahan dengan penuh keikhlasan, ketulusan dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Dr. Teguh Hadi Priyono, S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing II yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, kritik dan pengarahan dengan penuh keikhlasan, ketulusan dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Dr. Lilis Yuliati, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) selama kuliah terimakasih atas bimbingannya selama penulis menjadi mahasiswa;
4. Dr. Riniati, M.P. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan;
5. Dr. Herman Cahyo Diartho., S.E., M.P. selaku Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan;
6. Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak.,CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;

7. Dosen dan staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, terimakasih atas bimbingan dan pelayanannya selama penulis menjadi mahasiswa;
8. Kedua orang tua saya, Ayahanda Ngatmari dan Ibunda Mudjiati yang telah membimbing dari kecil hingga dewasa terimakasih banyak atas segala kasih sayang, dukungan dan doa pastinya yang selalu Beliau panjatkan teruntuk anak-anaknya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan lancar dan baik;
9. Kakakku Islamia Anne terimakasih sudah menjadi pengingat disaat penulis mulai lelah akan segala tugas yang akan diselesaikan;
10. Calon istriku Ica Dwi Erlita yang selalu menemani hari-hariku dan terus memberikan motivasi sampai saat ini;
11. Terimakasih kepada sahabat tercinta dan teman seperjuangan dari Lumajang Fariz Alqodri dan Aisyah Ayu yang telah membantu memberi dorongan akan kelulusan Penulis;
12. Sahabat satu aspal Grab Lumajang yang selalu memberikan motivasi dan canda tawa untuk melepas penat sejenak;
13. Teman – Teman ilmu ekonomi studi pembangunan angkatan 2013 terima kasih yang telah memberikan dukungan dan doanyayang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini, penulis menyadari atas kekurangan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun penulis harapkan bagi penyempurnaan tugas akhir ini. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan bagi penulisan karya tulis selanjutnya. Amin.

Jember, 16 Juli 2019

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBING	v
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
RINGKASAN/SUMMARY	x
PRAKATA	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Teori Pembangunan Ekonomi.....	9
2.1.1.1 Teori Pembangunan Rostow Dan Musgrave.....	10
2.1.2 Teori Pertumbuhan Adam Smith	11
2.1.2.1 Teori Pertumbuhan Endogen.....	11
2.1.3 Teori Pembangunan Manusia.....	12

2.1.4	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan	
	Manusia	19
2.1.5	Pengeluaran Pemerintah.....	20
2.1.5.1	Teori Pengeluaran Pemerintah Rostow dan	
	Musgrave	21
2.1.5.2	Peranan Pengeluaran Pemerintah.....	24
2.1.6	Teori Investasi	27
2.1.6.1	Hubungan Investasi dengan Pembangunan	
	Manusia	31
2.2	Penelitian Sebelumnya.....	32
2.3	Kerangka Konsep.....	34
2.4	Hipotesis.....	35
BAB 3.	METODE PENELITIAN	36
3.1	Jenis Penelitian	36
3.1.3	Waktu dan Lokasi Penelitian.....	36
3.2.3	Jenis dan Sumber Data	36
3.2	Metode Analisis	36
3.2.2	Analisis Regresi Data Panel	36
3.2.2	Estimasi Regresi Data Panel.....	37
3.2.2	Uji Penentuan Model.....	39
3.2.3	Uji Statistik.....	40
3.2.4	Uji Asumsi Klasik	42
3.3	Definisi Operasional.....	44
BAB 4.	HASIL DAN PEMBAHASAN	45
4.1	Gambaran Umum	45
4.1.1.	Gambaran Umum Kabupaten Lumajang	45
4.1.2	Gambaran Umum Kabupaten Jember	45
4.1.3	Gambaran Umum Kabupaten Situbondo	46
4.1.4	Gambaran Umum Kabupaten Bondowoso.....	47
4.1.5	Gambaran Umum Kabupaten Banyuwangi	48
4.1.6	Gambaran Umum Kabupaten Probolinggo.....	49

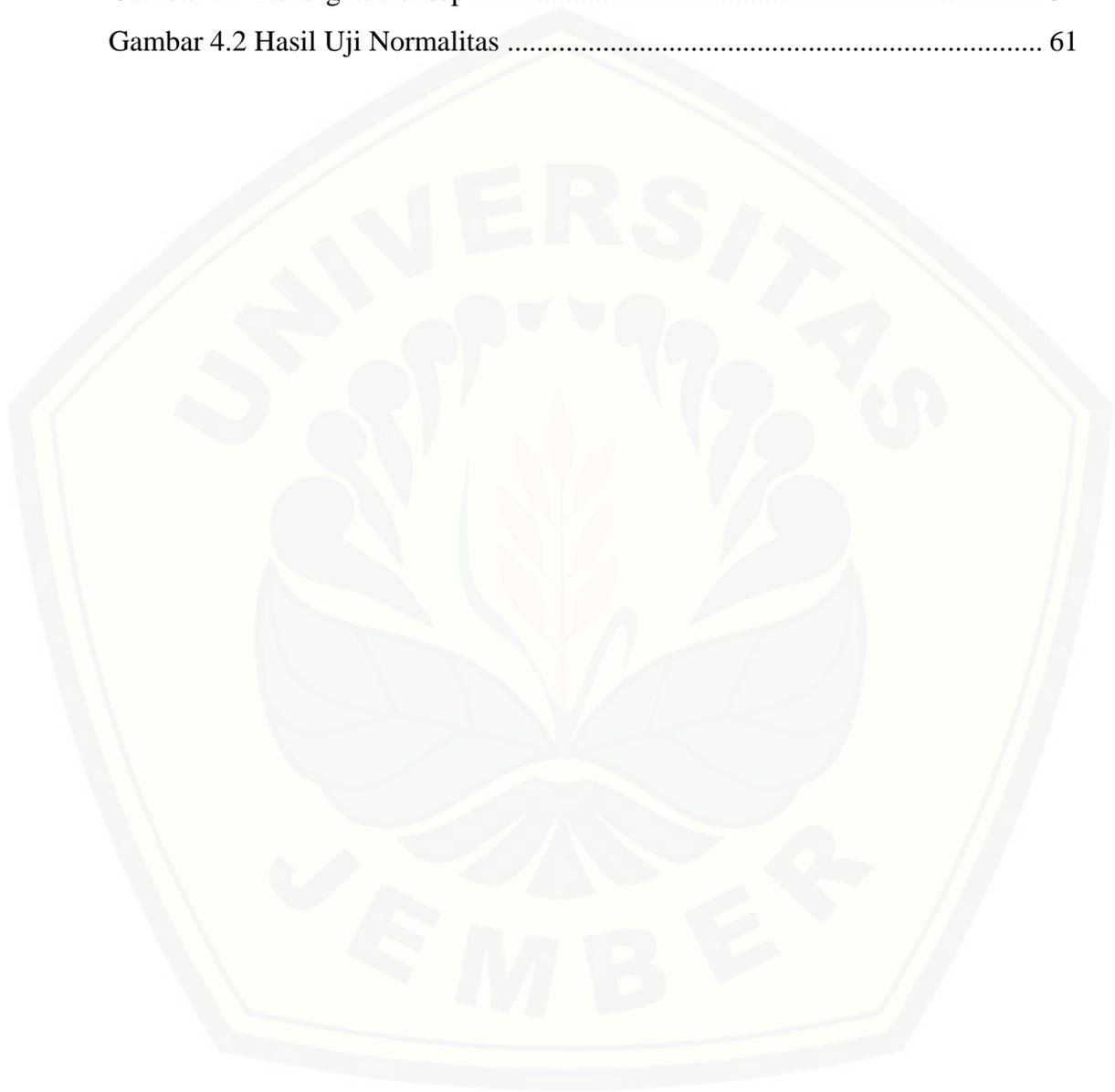
4.1.7	Gambaran Umum Kota Probolinggo	49
4.2	Hasil Analisis Data	50
4.2.1	Hasil Chow Test dan Hausman Test	50
4.2.2	Analisis Regresi Data Panel	52
4.2.3	Uji Statistik	54
4.2.4	Uji Asumsi Klasik	57
4.3	Pembahasan	61
4.3.1	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di bidang pendidikan terhadap IPM di wilayah BAKORWIL V Provinsi Jawa Timur	61
4.3.2	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di bidang kesehatan terhadap IPM di wilayah BAKORWIL V Provinsi Jawa Timur	63
4.3.3	Pengaruh Investasi Swasta terhadap IPM di wilayah BAKORWIL V Provinsi Jawa Timur.....	64
BAB 5.	KESIMPULAN DAN SARAN	65
5.1	Kesimpulan	65
5.2	Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA		66
LAMPIRAN		69

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel. 1.1 Indeks Pembangunan Manusia.....	3
Tabel 1.2 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2010-2016 (milyar rupiah)	5
Tabel 2.2 Penelitian Sebelumnya	32
Tabel 4.1 Hasil Uji Chow.....	51
Tabel 4.2 Hasil Uji Hausman	52
Tabel 4.8 Hasil Analisis Data Panel Menggunakan Pendekatan <i>Fix Effect Model</i>	53
Tabel 4.9 Hasil Uji F.....	55
Tabel 4.9 Hasil Uji t	56
Tabel 4.11 Hasil Uji Adjusted R-squared	57
Tabel 4.12 Hasil uji Multikolinieritas	58
Tabel 4.13 Hasil Uji Heterokedastisitas	59
Tabel 4.14 Hasil Uji Autokorelasi	60

DAFTARGAMBAR

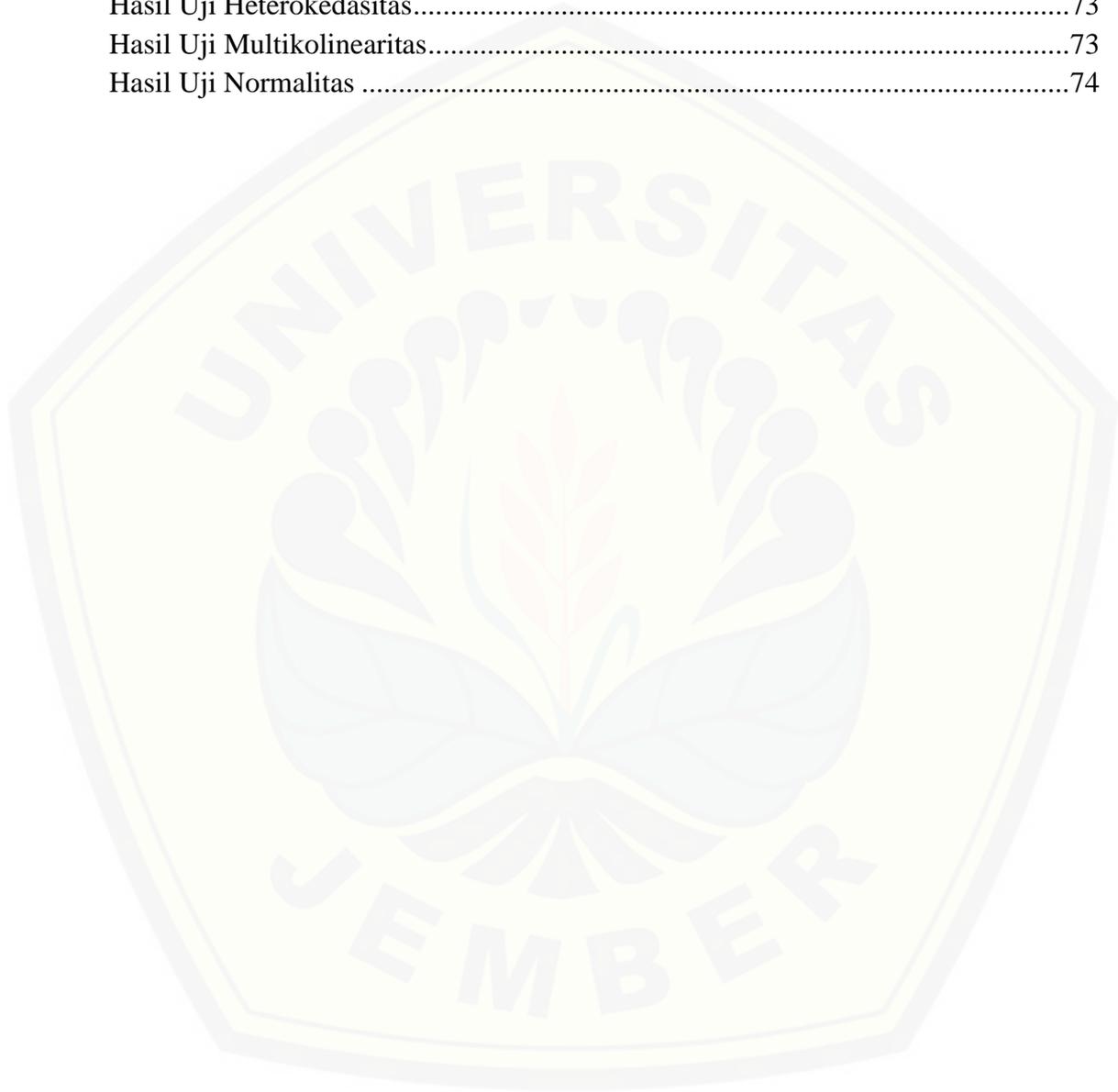
	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konsep	34
Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas	61



DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Rekapitulasi Data	69
Fixed effect.....	71
Uji Chow	72
Uji Hausman	72
Hasil Uji Heterokedasitas.....	73
Hasil Uji Multikolinearitas.....	73
Hasil Uji Normalitas	74



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha yang ditujukan untuk membuat kesejahteraan masyarakat meningkat, menekan angka pengangguran, dan meminimalkan ketimpangan pendapatan terdapat di masyarakat. Pembangunan ekonomi dapat berjalan efektif dan efisien ketika perencanaan pembangunan dapat dilakukan dengan tepat sasaran.. Selain itu evaluasi kebijakan juga perlu dilakukan mengingat untuk memperbaiki pembangunan di masa yang akan datang. Menurut (Todaro dalam Masjkuri, 2007) Sejak tahun 1970 pembangunan ekonomi mengalami redefinisi. Sejak tahun tersebut muncul pandangan baru yaitu tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi tidak lagi menciptakan tingkat pertumbuhan GNP yang setinggi-tingginya, melainkan penghapusan atau pengurangan tingkat kemiskinan, penanggulangan ketimpangan pendapatan, penyediaan lapangan kerja dalam konteks perekonomian yang terus berkembang.

Hakikat pembangunan ekonomi adalah kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Dalam mewujudkan hal tersebut, pemerintah melalui kuasa yang dimilikinya mengatur distribusi sumber daya secara adil dan wajar kepada masyarakat dengan semangat pelayanan. Masyarakat sebagai pemegang kedaulatan mempunyai kewajiban membayar pajak kepada negara agar pemerintahan dapat berjalan dan kesejahteraan dapat tercapai. Relasi kuasa masyarakat dan pemerintah ini harus berjalan secara seimbang dan saling menghargai. Dalam berbagai momentum relasi kuasa ini tidak berjalan dengan baik. Oleh karenanya ilmu pembangunan ekonomi mencoba menjembatani kedua pihak dengan cara memberi solusi atas berbagai persoalan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. (Santoso, 2013:77)

Salah satu peran pemerintah dalam mendorong kesejahteraan dan kemakmuran adalah peran alokatif. Dengan peran ini, pemerintah dapat mengalokasikan sumber-sumber ekonomi yang ada agar optimal dan efisien. Bentuk nyatanya adalah pemerintah mempunyai kewenangan besar dalam hal

pengelolaan fiskal. Fiskal merupakan kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Sebagaimana diketahui bahwa cakupan fiskal ini sangat luas, maka apabila dikaitkan dengan penelitian ini maka fiskal yang dimaksud adalah pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan dan pendidikan. Sementara kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dalam hal ini diarahkan pada parameter yang sudah menjadi parameter internasional dalam hal kesejahteraan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

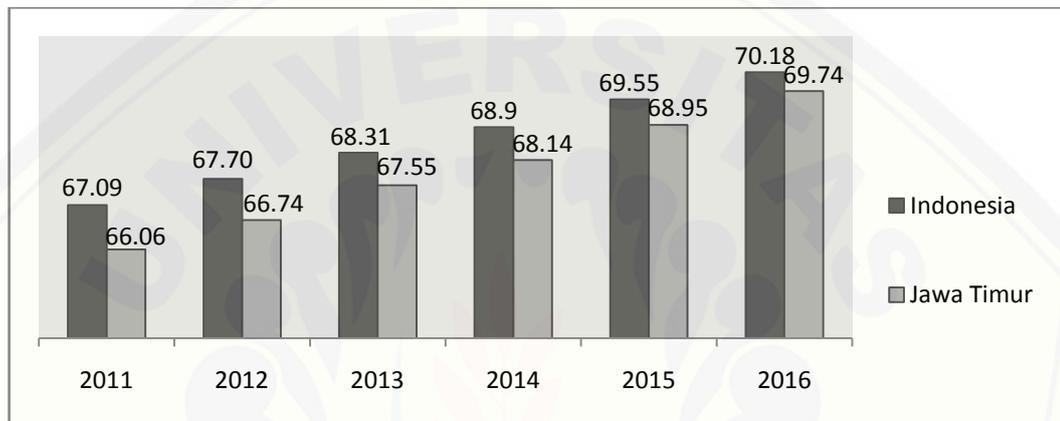
IPM merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar yang dilihat dari kualitas fisik dan non fisik penduduk. Adapun tiga indikator tersebut, yaitu: 1) Indikator kesehatan, 2) Tingkat pendidikan, dan 3) Indikator ekonomi. Kualitas sumber daya manusia, dapat dilihat dari indeks kualitas hidup/indeks pembangunan manusia. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Produktivitas yang rendah berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan, sehingga dengan rendahnya pendapatan menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin.

Dalam ilmu ekonomi sektor pendidikan dan kesehatan telah diyakini memainkan peran yang vital dalam pembangunan. Produktivitas sumber daya manusia sangat ditentukan oleh tingkat kesehatan yang berpengaruh pada keberhasilan pendidikan dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kesehatan dan pendidikan juga dapat dilihat sebagai komponen pertumbuhan dan pembangunan yang vital sebagai input fungsi produksi agregat. Peran gandanya sebagai input maupun output menyebabkan kesehatan dan pendidikan sangat penting dalam pembangunan ekonomi. (Todaro, 2002: 434).

Mill (1871) menyatakan bahwa jumlah penduduk sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi dimana penduduk sebagai penggerak perekonomian. Semakin banyak jumlah penduduk suatu daerah tidak berarti pembangunan di daerah tersebut menjadi lebih baik. Jumlah penduduk yang berlebihan justru akan menjadi faktor penghambat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Jumlah stok barang modal menjadi faktor yang mempengaruhi

pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan produksi barang dan jasa yang selanjutnya akan diperjual belikan. Sementara luas tanah dan kekayaan merupakan pendukung kegiatan-kegiatan perekonomian. Tingkat teknologi tidak bisa dilepaskan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dikarenakan teknologi dapat menentukan efektivitas dan efisiensi kegiatan ekonomi. Berikut adalah perkembangan dan pertumbuhan kualitas sumber daya manusia di Indonesia yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Tabel. 1.1 Indeks Pembangunan Manusia



Sumber : data BPS, 2011 – 2016.

Terlihat dari tabel 1.1 bahwa Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia setiap tahunnya mengalami kenaikan, tidak itu juga Jawa Timur juga berbanding lurus dengan Indonesia. hal ini membuktikan bahwa pemerintah berhasil melakukan peningkatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur. Apabila dibandingkan dengan Provinsi lainnya, Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur masih tertinggal jauh.

Banyaknya jumlah penduduk pada kelompok usia produktif dibandingkan kelompok usia non-produktif dapat memberikan manfaat bagi pembangunan nasional terutama pada sektor ekonomi. Akan tetapi untuk memanfaatkan kondisi tersebut, kualitas SDM harus ditingkatkan secara maksimal antara lain melalui peningkatan tingkat pendidikan untuk kelompok usia produktif baik untuk penduduk desa maupun kota. Menurut UNICEF (2012) untuk memperoleh

pekerjaan yang layak dengan upah tinggi, seseorang membutuhkan keterampilan (skill) yang memadai. Keterampilan yang memadai bisa diperoleh melalui pendidikan. Pembentukan modal manusia melalui investasi dalam bidang pendidikan merupakan cara terbaik untuk pertumbuhan ekonomi (Seran, 2012).

Upaya meningkatkan IPM di Jawa Timur dilakukan melalui instrumen kebijakan fiskal, dimanapenyediaan pelayanan dasar dilaksanakan melalui mekanisme anggaran. Alokasi anggaran bidang kesehatan masuk dalam kategori belanja sosial. Dalam praktiknya, pemerintah daerah mempunyai kebijakan yang berbeda dalam meningkatkan sumber daya manusianya. Hal ini dapat dilihat pada format penganggaran belanjanya pada bidang kesehatan, sehingga hasil yang diperoleh tiap-tiap daerah berbeda-beda. Kondisi demikian menjadi polemik yang memunculkan perdebatan peran pemerintah yang belum maksimal dalam mensejahterakan masyarakat melalui penerapan kebijakan IPM.

Selanjutnya indikator yang diduga berpengaruh terhadap IPM adalah investasi swasta. Investasi akan berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, karenan investasi meningkatkan jumlah tenaga kerja yang terserap. Masyarakat yang sebelumnya menjadi pengangguran akan mendapatkan pekerjaan dan pendapatan. Seiring dengan meningkatnya pendapatan, daya beli masyarakat yang merupakan bagian dari komponen IPM nantinya juga akan meningkat. Pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan adanya pemerataan pendapatan dalam masyarakat akan mengakibatkan jumlah peningkatan IPM lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai dengan pemerataan pendapatan dalam masyarakat (Sumanto, 2012).

Ditinjau dari sumber daya yang dimiliki, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP RI) Nomor 26 tahun 2008 tanggal 10 Maret 2008 (dalam Sarwedi dkk, 2013) tentang kawasan andalan, wilayah BAKORWIL V merupakan kawasan pengembangan dan pengendalian andalan untuk sektor perkebunan, pertanian, industri, pariwisata dan perikanan laut dan BAKORWIL V memiliki potensi unggulan yang dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masing-masing wilayah sebagai wilayah yang memiliki beberapa kabupaten antara lain: Kabupaten Jember, Bondowoso, Situbondo,

Banyuwangi, Lumajang, Probolinggo dan Kota Probolinggo. Dimana beberapa daerah tersebut mempunyai kemungkinan yang sangat besar untuk aktifitas penanaman modal khususnya mengenai investasi swasta, karena memiliki potensi sumberdaya melimpah dan cukup strategis yang perlu digali lebih luas dan pengembangan potensi untuk menjadi daerah yang lebih maju. Dengan adanya investasi maka kapasitas dalam produksi akan meningkat yang kemudian akan mempengaruhi output yang dihasilkan. Meningkatnya output akan menyebabkan meningkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai (Sukirno, 2012:121).

BAKORWIL V merupakan wilayah administratif pemerintahan jaman Hindia Belanda yang berada di Jawa Timur bagian timur yang meliputi Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo dan Kota Probolinggo. Ke tujuh kabupaten tersebut merupakan daerah yang bekerjasama dalam hal pengembangan industri, pengembangan produk daerah dan dalam kegiatan ekonomi lainnya sehingga diharapkan hal tersebut menjadi peluang bagi ke tujuh kabupaten tersebut untuk dapat saling melengkapi antar kabupaten dan dapat menunjang kekurangan yang ada disetiap kabupaten sehingga akan tercapai pemerataan indeks pembangunan manusia. Perkembangan jumlah rata-rata PDRB menurut Kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur yang di spesifikasikan kepada BAKORWIL.

Tabel 1.2 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2010-2016 (milyar rupiah).

Kabupaten	Jember	Banyuwangi	Bondowoso	Situbondo	Lumajang	Kab. Probolinggo	Kota. Probolinggo
2010	33375.50	34463.80	8515.90	8471.40	14260.10	15018.10	4921.30
2011	37159.50	36950.90	9552.80	9536.40	16078.50	16874.50	5376.50
2012	41327.10	42108.30	10634.10	10708.20	17783.30	18796.80	5945.70
2013	45055.50	47.364.70	11792.60	11912.80	19637.00	20830.90	6564.00
2014	50602.10	53371.20	13075.10	13338.80	21983.10	23158.00	7260.70
2015	56377.40	60179.30	14485.60	14.4795.70	24417.10	25688.60	8072.10
2016	62470.10	66340.80	15858.50	16.278.60	26638.10	28045.90	8888.10

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Berdasarkan Tabel 1.2 perkembangan PDRB berdasarkan harga konstan 2010 menurut kabupaten/kota dari tahun 2010 sampai 2016 secara umum menunjukkan kenaikan yang cukup stabil dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010, jumlah PDRB di kabupaten Jember sebesar Rp. 33 375.50 milyar, kabupaten Banyuwangi sebesar Rp. 34 463.80 milyar, kabupaten Bondowoso sebesar Rp. 8 515.90 milyar, kabupaten Situbondo sebesar Rp. 8 471.40 milyar, kabupaten Lumajang sebesar Rp. 14 260.10 milyar, kabupaten Probolinggo sebesar Rp. 15 018.10 milyar dan kota Pobolinggo sebesar Rp. 4 921.30 milyar. Kemudian pada tahun 2016 jumlah PDRB kabupaten Jember sebesar 62 470.10 milyar, kabupaten Banyuwangi sebesar Rp. 66 340.80 milyar, kabupaten Bondosowo sebesar Rp. 15 858.50 milyar, kabupaten Situbondo sebesar Rp. 16 278.60 milyar kabupaten Lumajang sebesar Rp. 26 638.10 milyar, kabupaten Probolinggo sebesar Rp. 28 045.90 milyar dan kota Pobolinggo sebesar Rp. 8 888.10 milyar yang artinya setiap kabupaten mengalami kenaikan pada PDRB dan setiap kabupaten memiliki jumlah PDRB yang berbeda-beda dengan demikian perbedaan tersebut dapat menimbulkan disparitas atau ketimpangan regional.

Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Banyuwangi, dan Kabupaten Situbondo Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo dan Kota Probolinggo, sudah mulai berkembang, dan dilihat dari potensi-potensi di setiap daerah sangatlah membantu mengembangkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi ini sendiri, tetapi terdapat PDRB dua wilayah yang tertinggal yaitu Kabupaten Bondowoso dan kota Pobolinggo. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi disuatu daerah sangatlah penting karna akan saling mempengaruhi suatu daerah kedaerah yang lainnya, karna penentuan pusat pertumbuhan sangatlah menentukan perkembangan di wilayah BAKORWIL

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis mengambil judul untuk penulisan tugas akhir ini adalah **“Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Investasi Swata terhadap Indeks Pembangunan Manusia di wilayah BAKORWIL V provinsi Jawa Timur .”** dengan alasan agar dapat mengetahui bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang

pendidikan dan kesehatan dan investasi swasta terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Pengeluaran Pemerintah di bidang pendidikan terhadap IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di wilayah BAKORWIL V provinsi Jawa Timur?
2. Bagaimana pengaruh Pengeluaran Pemerintah di bidang kesehatan terhadap IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di wilayah BAKORWIL V provinsi Jawa Timur?
3. Bagaimana pengaruh investasi swasta terhadap IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di wilayah BAKORWIL V provinsi Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang terkait dengan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui pengaruh Pengeluaran Pemerintah di bidang pendidikan terhadap IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di wilayah BAKORWIL V provinsi Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pengeluaran Pemerintah di bidang kesehatan terhadap IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di wilayah BAKORWIL V provinsi Jawa Timur.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh investasi swasta terhadap IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di wilayah BAKORWIL V provinsi Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak yang terkait yaitu pemerintah dan peneliti :

1. Bagi peneliti lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan bagi peneliti dalam mengaplikasikan teori-teori yang didapat selama perkuliahan ke dalam keadaan ekonomi masyarakat sesungguhnya.

2. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan aspirasi pemikiran terhadap pengambil keputusan kebijakan dalam upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Timur.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Pembangunan Ekonomi

Menurut Todaro (2004:20) pembangunan dipandang sebagai proses multidimensi yang melibatkan berbagai perubahan mendasar dalam struktur sosial, sikap masyarakat dan lembaga nasional serta percepatan pertumbuhan, pengurangan ketimpangan, dan penanggulangan kemiskinan. Pada hakikatnya pembangunan mencerminkan perubahan sistem sosial secara total sesuai dengan berbagai kebutuhan dasar, serta upaya menumbuhkan aspirasi individu dan kelompok – kelompok sosial dalam sistem tersebut.

Pembangunan seharusnya merupakan upaya untuk mengubah kondisi kehidupan dari yang dipandang tidak memuaskan menjadi lebih baik secara lahir dan batin. Pembangunan ekonomi merupakan upaya untuk mewujudkan adanya perubahan – perubahan ekonomi disamping itu sudah tentu terjadi kenaikan output. Pembangunan selalu diikuti oleh pertumbuhan akan tetapi dalam pertumbuhan, belum tentu mencakup unsur pembangunan, maka pertumbuhan ekonomi yang terus menerus dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat yang merupakan tujuan utama dari keberlangsungan pembangunan (Adisasmita,2011:24).

Pembangunan adalah kenyataan fisik sekaligus keadaan mental (*state ofmind*) dari suatu masyarakat telah, melalui kombinasi tertentu dalam proses sosial,ekonomi, dan lembaga memiliki cara untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Apapun komponen yang tercakup dalam kehidupan yang lebih baik tersebut, pembangunan di semua masyarakat setidaknya harus memiliki tiga tujuan berikut (Todaro dan Smith, 2011:27) :

- a. Peningkatan ketersediaan dan perluasan distribusi barang – barang kebutuhan hidup yang pokok seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan dan perlindungan.

- b. Peningkatan standar hidup yang bukan hanya berupa peningkatan pendapatan tetapi juga ketersediaan lapangan kerja yang lebih banyak, pendidikan yang lebih baik, serta perhatian lebih besar terhadap nilai – nilai budaya dan kemiskinan. Secara keseluruhan, hal – hal ini tidak hanya dapat meningkatkan kesejahteraan yang bersifat materi (*material well-being*) tetapi juga menumbuhkan harga diri individu dan bangsa.
- c. Perluasan pilihan ekonomi dan sosial yang tersedia bagi individu dan bangsa secara keseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka dari ketergantungan terhadap orang atau negara – negara lain, namun juga terhadap setiap kekuatan yang berpotensi merendahkan nilai – nilai kemanusiaan mereka.

2.1.1.1 Teori Pembangunan Rostow Dan Musgrave

Dimana mereka menghubungkan pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi. Pada tahap awal perkembangan ekonomi menurut mereka rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional yang relatif besar. Tahap awal pemerintah harus menyediakan berbagai sarana dan prasarana. Selanjutnya tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan guna memacu pertumbuhan agar dapat lepas landas. Bersamaan dengan itu pula posisi investasi pihak swasta juga meningkat.

Dalam suatu proses pembangunan, menurut Musgrave rasio investasi total terhadap pendapatan nasional akan mengecil. Rostow berpendapat bahwa pada tahap lanjut pembangunan terjadi peralihan aktifitas pemerintah, dari penyediaan prasarana ekonomi ke pengeluaran-pengeluaran untuk layanan sosial seperti kesehatan dan pendidikan. Teori Rostow dan Musgrave adalah pandangan yang timbul dari pengamatan atas pengalaman pembangunan ekonomi yang dialami banyak negara, tetapi tidak didasari oleh suatu teori tertentu. Selain itu tidak jelas, apakah tahap pertumbuhan ekonomi terjadi dalam tahap demi tahap, atau beberapa tahap dapat terjadi secara simultan (Mangkoesoebroto 1998 dalam M. Taufiq, 2016).

2.1.2 Teori Pertumbuhan Adam Smith

Adam Smith merupakan ekonom pertama kali yang membahas tentang masalah pertumbuhan ekonomi, ia mengemukakan tentang proses pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Adam Smith menganggap bahwa pekerja merupakan salah satu input bagi proses produksi, dimana Adam Smith membahas upaya peningkatan produktivitas tenaga kerja. Menurut Adam Smith, peningkatan keterampilan pekerja menjadi salah satu faktor pendorong dalam upaya peningkatan produktivitas tenaga kerja. Adam Smith juga menyatakan bahwa modal memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi, sehingga akumulasi modal akan menentukan cepat atau lambatnya pertumbuhan ekonomi (Sun'an, 2015:2-3).

Produktivitas yang tinggi dapat menghasilkan peningkatan kinerja, dengan kinerja yang meningkat maka akan meningkatkan pula minat untuk pemupukan modal, mendorong kemajuan teknologi, dan lain-lain. Terdapat dua aspek utama pertumbuhan ekonomi Adam Smith, yaitu pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk. Unsur pokok menurut Smith dalam pertumbuhan output total yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, dan stok barang modal. Penduduk merupakan tenaga kerja, dimana laju pertumbuhan permintaan tenaga kerja ditentukan oleh laju pertumbuhan akumulasi modal dan laju pertumbuhan *output* (Sun'an, 2015:3).

2.1.2.1 Teori Pertumbuhan Endogen

Terdapat pemahaman baru tentang tolak ukur keberhasilan pembangunan suatu negara, yaitu teori dari Lucas dan Romer "teori pertumbuhan endogen", dimana dalam teori ini disebutkan bahwa keberhasilan suatu pembangunan tidak cukup apabila hanya dilihat dari besarnya PDRB tanpa ada upaya peningkatan pembangunan manusianya (Priambodo, 1995:9).

Ketidakmampuan teori neo-klasik Solow menjelaskan dengan baik pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, Solow menjelaskan bahwa pertumbuhan output didorong oleh tingkat perkembangan teknologi, tetapi dalam model Solow tidak dijelaskan penyebab perkembangan teknologi. Sehingga

lahirlah teori pertumbuhan endogen yang dipelopori oleh Paul M Romer dan Robert Lucas, teori pertumbuhan endogen menjelaskan bahwa perkembangan teknologi dapat diciptakan oleh proses belajar (*learning by doing*), investasi dalam penelitian dan akumulasi dari pengetahuan. Pemahaman ini sebagai respon terhadap perkembangan teknologi dalam proses produksi, sedangkan teori Neo-Klasik Solow tidak dapat menjelaskan dengan baik tentang perkembangan teknologi tersebut.

Dalam teori endogen terdapat dua cabang pemikiran, dimana kedua pemikiran tersebut sependapat bahwa sumber daya manusia (SDM) merupakan hal yang paling utama dalam upaya peningkatan produktivitas ekonomi. Kedua cabang pemikiran tersebut, yaitu (a) yang pertama yaitu pemikiran bahwa *learning-by-doing* dengan memperkenalkan hal-hal baru untuk mencapai peningkatan produktivitas perekonomian, (b) yang kedua terdapat pemikiran bahwa *knowledge stock* dalam bentuk penemuan-penemuan baru merupakan kunci utama dari peningkatan produktivitas ekonomi.

Prijambodo (1995:9) menjelaskan bahwa peranan sumber daya manusia (SDM) dalam teori ini sangat diperhitungkan, karena sumber pertumbuhan dalam teori pertumbuhan endogen baik model *learning-by-doing* maupun penemuan baru, terkandung dalam kualitas SDM. Adam Smith juga telah menjelaskan pentingnya peranan SDM dalam pertumbuhan sejak akhir abad 18. Pengembangan teori ini memberikan perhatian lebih besar terhadap pembangunan manusia, apabila pengetahuan baru dan ketrampilan terkandung dalam SDM, dan pembangunan ekonomi tergantung pada kemajuan teknologi, pengetahuan dan cara-cara baru dalam produksi, maka keberhasilan pembangunan akan ditentukan akumulasi dari kualitas SDM.

2.1.3 Teori Pembangunan Manusia

Definisi Pembangunan Manusia menurut UNDP (*United Nation Development Program*) adalah suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk. Jika mengacu pada pengertian tersebut, maka penduduk menjadi tujuan akhir dari pembangunan, sedangkan upaya pembangunan

merupakan sarana (*principal means*) untuk tujuan tersebut. Definisi ini lebih luas dari definisi pembangunan yang hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi. Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sisi manusianya, bukan hanya dari sisi pertumbuhan ekonomi.

Dari definisi yang diberikan oleh UNDP tersebut mencerminkan bahwa manusia dalam suatu wilayah selayaknya memiliki dan diberikan pilihan-pilihan yang luas dan dibutuhkan dukungan dari pemerintah guna memberikan sarana bagi masyarakat untuk dapat memanfaatkan dan mengambil keputusan sesuai dengan pilihan yang diambilnya. Paradigma tersebut memunculkan pilihan-pilihan yang lebih luas bagi masyarakat seperti kebebasan politik, ekonomi dan sosial serta kesempatan untuk menjadi lebih kreatif dan produktif sesuai dengan hak-hak manusia yang menjadi bagian dari paradigma tersebut.

Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, empat hal pokok yang perlu diperhatikan adalah produktivitas, pemerataan, kesinambungan, pemberdayaan (UNDP, 1995 dalam Rinda Ayun dan Lutfi Muta'li 2013). Secara ringkas empat hal pokok tersebut mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Produktifitas

Penduduk harus meningkatkan produktifitas dan partisipasi penuh dalam proses penciptaan dan nafkah. Sehingga pembangunan ekonomi merupakan bagian dari model pembangunan manusia

2. Pemerataan

Penduduk memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial. Semua hambatan yang memperkecil kesempatan untuk memperoleh akses tersebut harus dihapus, sehingga mereka dapat mengambil manfaat dari kesempatan yang ada dan berpartisipasi dalam kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kualitas hidup.

3. Kestinambungan

Akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial harus dipastikan tidak hanya untuk generasi-generasi yang akan datang. Semua sumber daya fisik, manusia dan lingkungan selalu dipengaruhi.

4. Pemberdayaan

Penduduk harus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses yang akan menentukan (bentuk/arah) kehidupan mereka serta untuk berpartisipasi dan mengambil keputusan dalam proses pembangunan.

Pembangunan manusia pada hakikatnya adalah memperluas pilihan bagi masyarakat dengan tujuan akhir mencapai kesejahteraan tiap-tiap anggota masyarakat sehingga pembanguan manusia dalam hal ini juga mencakup berbagai aspek lainnya yaitu selain aspek ekonomi terdapat pula aspek sosial, politik, budaya serta aspek lainnya untuk menjadikan manusia lebih produktif dalam berkegiatan. Dengan demikian paradigma pembangunan manusia mencakup dua sisi yaitu berupa informasi kapabilitas manusia seperti perbaikan taraf kesehatan, pendidikan dan keterampilan. Sisi lainnya adalah pemanfaatan kapabilitas mereka untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif, kultural, sosial dan politik.

Aspek pembangunan manusia ini dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia ini merupakan salah satu alternatif pengukuran pembangunan selain menggunakan Gross Domestic Bruto. Nilai IPM suatu negara atau wilayah menunjukkan seberapa jauh negara atau wilayah itu telah mencapai sasaran yang ditentukan yaitu angka harapan hidup, pendidikan dasar bagi semua lapisan masyarakat (tanpa kecuali), dan tingkat pengeluaran dan konsumsi yang telah mencapai standar hidup yang layak.

Tingkat pendidikan dan kesehatan individu penduduk merupakan faktor dominan yang perlu mendapat prioritas utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan tingkat pendidikan dan kesehatan penduduk yang tinggi menentukan kemampuan untuk menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baik dalam kaitannya dengan teknologi sampai kelembagaan yang penting dalam upaya meningkatkan tingkat kesejahteraan

penduduk itu sendiri yang semuanya bermuara pada aktivitas perekonomian yang maju.

Indeks pembangunan manusia (IPM), atau dikenal dengan *human development index* (HDI) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur salahsatu aspek penting yang berkaitan dengan kualitas dari hasil pembangunan ekonomi, yakni derajat perkembangan manusia. IPM adalah suatu indeks komposisi yang didasarkan pada tiga indikator, yaitu (a) kesehatan; (b) pendidikan yang dicapai; dan (c) standart kehidupan. Jadi jelas bahwa ketiga unsur ini sangat penting dalam menentukan tingkat kemampuan suatu wilayah untuk meningkatkan IPM nya. Ketiga unsur tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya, selain juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti ketersediaan keempatan kerja, yang pada gilirannya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dn kebijakan pemerintah. Dengan istilah, terdapat suatu korelasi positif antara nilai IPM dengan derajat keberhasilan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Penetapan kategori IPM didasarkan pada skala 0,0-0,10 yang terdiri dari (Tambunan, 2003 : 167):

Kategori low	: nilai IPM < 50
Kategori lower medium	: nilai IPM antara 50 - 65.99
Kategori upper medium	: nilai IPM antara 66 – 79.99
Kategori high	: nilai IPM > 80

Menurut Human Developmet Report (HDR) tahun 1993, pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimilkioleh manusia. Diantra banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup layak. Sehingga muncul suatu Indeks Pembangunan Manusia, yaitu untuk mengukur capaian pembangunan manusa berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan dan

kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili pencapaian pembangunan untuk hidup layak (Badan Pusat Statistik).

Pengembangan sumber daya manusia disatu pihak dimaksudkan untuk meningkatkan keterampilan atau kemampuan kerja manusia dalam melakukan berbagai macam kegiatan dalam masyarakat. Dipihak lain pembinaan sumber daya manusia berhubungan erat dengan usaha peningkatan taraf hidup masyarakat. Pembinaan sumber daya manusia dimulai dalam kalangan keluarga, ditingkatkan melalui pendidikan dan latihan formal dan dikembangkan dalam masyarakat terutama pada lingkungan kerja. Perkembangan teknologi dalam kegiatan perekonomian sangat menuntut kepada sumber daya manusia untuk meningkatkan keterampilan.

Konsep IPM pertama kali dipublikasikan UNDP melalui *Human Development Report* pada tahun 1996, yang kemudian berlanjut setiap tahun. Dalam publikasi tersebut dijelaskan bahwa pembangunan manusia adalah sebagai “*a process of enlarging people’s choices*” atau proses yang meningkatkan aspek kehidupan masyarakat. Secara spesifik UNDP menetapkan empat elemen utama dalam pembangunan manusia yaitu produktivitas (*productivity*); Pemerataan (*equity*); keberlanjutan (*sustainability*), dan pemberdayaan (*empowerment*).

Laporan pembangunan sumber daya manusia yang telah dipublikasikan oleh UNDP (*United Nations Development Programme*) dalam bentuk ukuran kuantitatif yang biasa disebut HDI (*Human Development Indeks*). HDI digunakan sebagai tolak ukur pembangunan sumber daya manusia yang dirumuskan secara konstan, dianggap tidak akan pernah memberikan gambaran pembangunan secara menyeluruh.

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur ukuran HDI adalah sebagai berikut (UNDP, Human Development Report, 1993).

a. Indeks Harapan Hidup (longevity)

Indeks harapan hidup atau disebut juga lamanya hidup diartikan bahwa bertahan lebih lama dapat diukur dengan indeks harapan hidup saat lahir (life expectancy of birth) dan angka kematian bayi per seribu penduduk (infant mortality rate). Dengan menyertakan informasi tentang angka kelahiran dan kematian per tahunnya, dimana variable tersebut diharapkan mampu mempresentasikan rata-rata lama hidup beserta hidup sehat masyarakat. Dikarenakan sulitnya untuk mendapatkan informasi orang yang meninggal pada periode waktu tertentu, maka digunakan metode tidak langsung untuk. Perhitungan secara tidak langsung dilakukan berdasarkan dua data dasar yaitu rata-rata jumlah lahir hidup dan rata-rata anak yang masih hidup dari wanita yang pernah kawin. Untuk mendapatkan indeks harapan hidup dengan menetapkan standar angka harapan hidup berdasarkan nilai maksimum dan minimumnya.

b. Indeks Pendidikan

Untuk menghitung Indeks Pendidikan (IP) dalam perhitungan IPM, mencakup dua parameter yaitu angka melek huruf (Lit) dan rata-rata lama sekolah (MYS). Populasi yang digunakan adalah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bias membaca dan menulis dalam huruf latin atau huruf lainnya. Perlunya batasan tersebut agar angkanya dapat mencerminkan kondisi sebenarnya mengingat penduduk yang berumur dibawah 15 tahun masih dalam proses sekolah akan sekolah sehingga belum pantas untuk rata-rata lama sekolahnya. Kedua parameter tersebut disertakan agar mampu menggambarkan tingkat pengetahuan (gambaran angka LIT), Dimana LIT merupakan rasio penduduk yang memiliki kemampuan baca tulis dalam suatu kelompok penduduk secara keseluruhan. Sedangkan gambaran angka MYS merupakan cerminan terhadap keterampilan yang dimiliki penduduk.

Kebijakan pokok dalam upaya peningkatan kualitas hidup manusia secara lintas sektoral, diantaranya adalah :

1. Peningkatan kualitas fisik manusia (*individual fisycal quality*) yang meliputi jasmani, rohani dan motivasi, serta kualitas kecukupan kebutuhan dasar seperti terpenuhinya gizi, sandang, perumahan daan pemukiman yang sehat.
2. Peningkatan kualitas keterampilan (*skills*) sumber daya manusia yang produktif dan upaya pemerataan penyebarannya.
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berwawasan lingkungan.
4. Peningkatan pranata dan penerapan hukum yang meliputi kelembagaan, perangkat, & aparat, serta kepastian hukum. Sedangkan secara sektoral, operasionalnya dilaksanakan melalui berbagai sektor pembangunan, antara lain sektor pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kependudukan, tenaga kerja, dan sektor-sektor pembangunan lainnya

IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari 3 (tiga) indeks yang menggambarkan kemampuan dasar manusia dalam memperluas pilihan-pilihan, yaitu: 1) Indeks Kesehatan, 2) Indeks Pendidikan, 3) Indeks Pengeluaran. Setiap komponen IPM distandardisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM. Rumus yang digunakan sebagai berikut.

Indeks Kesehatan :

$$I_{kesehatanit} = \frac{AHH_{it} - AHH_{min\ it}}{AHH_{maksit} - AHH_{min\ it}}$$

Indeks Pendidikan :

$$I_{HLS\ it} = \frac{HLS_{it} - HLS_{min\ it}}{HLS_{maks\ .it} - HLS_{min\ .it}}$$

$$I_{RLS.it} = \frac{RLS.it - RLS_{min\ .it}}{RLS_{maks\ .it} - RLS_{min\ .it}}$$

$$I_{pendidikan\ .it} = \frac{I_{HLS\ .it} - I_{RLS\ .it}}{2}$$

Indeks Pengeluaran :

$$I_{\text{pengeluaran}} .it = \frac{\ln(\text{pengeluaran} .it) - \ln(\text{pengeluaran}_{\text{min}} .it)}{\ln(\text{pengeluaran}_{\text{maks}} .it) - \ln(\text{pengeluaran}_{\text{min}} .it)}$$

Menghitung IPM

IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran.

$$IPM_{it} = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatanit}} \times I_{\text{pendidikanit}} \times I_{\text{pengeluaranit}}} \times 100$$

2.1.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia

Sentra pembangunan manusia terletak pada perkembangan modal manusianya, teori pertumbuhan ekonomi Adam Smith menjelaskan bahwa modal dalam pertumbuhan ekonomi meliputi modal fisik, modal manusia dan modal alam, pencapaian pertumbuhan dan kemajuan ekonomi sangat bergantung pada pembentukan modal dalam arti luas (modal fisik, modal manusia dan modal alam). Pembangunan yang berkelanjutan terjadi ketika modal dapat meningkat dalam jangka panjang, yaitu ketika modal fisik dan modal manusia mengalami peningkatan tetapi tetap dapat menjaga kelestarian modal alam.

World Bank (2001) dalam Abbas (2010) mengatakan bahwa kemajuan dalam modal manusia dapat meningkatkan produktivitas dan tingkat pengembalian modal fisik. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh akumulasi modal, termasuk semua investasi baru yang berwujud tanah, peralatan fisik dan sumber daya manusia. Investasi dalam pembinaan sumber daya manusia bermuara pada peningkatan kualitas modal manusia, yang pada akhirnya akan berdampak positif terhadap angka produksi (Todaro, 2003:92-98). Proses tersebut tidak terlepas dari kebijakan institusi dan pemerintah, komitmen pemerintah dalam pendistribusian sumber daya dilakukan melalui dua saluran, yakni dari kebijakan pengeluaran pemerintah pada prioritas sosial seperti pembangunan infrastruktur dan melalui kegiatan pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan individu rumah tangga (sandang, pangan dan papan), kedua hal tersebut selanjutnya dapat membangun manusia yang berkualitas (Patriotika, 2011:19).

Todaro menyatakan, “Modal manusia adalah investasi produktif terhadap orang-orang; mencakup pengetahuan, keterampilan, kemampuan, gagasan, kesehatan dan lokasi” (Todaro, 2011:445-447). Menurut Schweke (2004) dalam Patriotika (2011:21), pendidikan bukan saja akan melahirkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas, memiliki pengetahuan dan keterampilan serta menguasai teknologi, tetapi juga dapat menumbuhkan iklim bisnis yang sehat dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, sehingga investasi dibidang pendidikan menjadi salah satu hal yang penting dalam pembangunan manusia. Kesehatan menjadi salah satu faktor terpenting pembangunan manusia, tenaga kerja yang sehat secara fisik dan mental akan lebih enerjik dan kuat, lebih produktif, dan mendapatkan penghasilan yang tinggi (Patriotika, 2011:22). Lokasi menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan manusia, hal ini dikarenakan dengan adanya infrastruktur yang memadai pada suatu wilayah dapat meningkatkan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan lapangan pekerjaan, dengan meningkatnya lapangan pekerjaan maka akan meningkatkan pula pendapatan masyarakat, dengan pendapatan yang meningkat maka daya beli masyarakat akan meningkat pula.

2.1.5 Pengeluaran Pemerintah.

Pengeluaran pemerintah dapat dilihat dari keseimbangan pendapatan nasional yaitu:

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

Menurut pandangan kaum keynesian akan relevansi campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Dari persamaan tersebut dapat dilihat bahwa kenaikan atau penurunan pengeluaran pemerintah akan menaikkan atau menurunkan pendapatan nasional. Banyak pertimbangan dalam mendasari pengambilan keputusan pemerintah dalam mengatur pengeluarannya. Tetapi juga harus memperhitungkan sasaran antara yang akan menikmati kebijakan tersebut. Memperbesar pengeluaran dengan tujuan semata untuk meningkatkan pendapatan nasional atau memperluas tenaga kerja adalah tidak memadai. Tetapi harus diperhitungkan siapa saja yang bekerja atau meningkat pendapatannya. Pemerintah juga perlu menghindari pihak swasta.

Dalam kebijakan fiskal pengeluaran pemerintah dikenal dengan kebijakan anggaran yang meliputi: anggaran berimbang, anggaran surplus dan anggaran defisit. Dalam anggaran berimbang yaitu suatu kondisi dimana penerimaan sama dengan pengeluaran ($G = T$). Anggaran surplus yaitu pengeluaran lebih kecil dari pendapatan sedangkan anggaran defisit yaitu pengeluaran lebih besar dari pendapatan. Apabila pemerintah merencanakan peningkatan pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi angka pengangguran maka pemerintah dapat meningkatkan pengeluarannya. Pengeluaran pemerintah terdiri dari: (Dumairy 1997 dalam Septian Jefri 2015)

- a. Pengeluaran rutin yaitu pengeluaran yang digunakan untuk memelihara dan penyelenggaraan pemerintah yang meliputi belanja pegawai, belanja dalam pembayaran hutang, subsidi dan pengeluaran rutin lainnya.
- b. Pengeluaran pembangunan yaitu, pengeluaran yang digunakan untuk membiayai pembangunan dibidang sosial, ekonomi dan umum dan bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk pembangunan baik secara fisik atau non fisik.

2.1.5.1 Teori Pengeluaran Pemerintah Rostow dan Musgrave

Menurut pengklasifikasian Todaro, teori Rostow ini dikelompokkan ke dalam model jenjang linier (*linier stage model*). Menurut Rostow, proses pembangunan ekonomi bisa dibedakan dalam 5 tahap yaitu masyarakat tradisional, prasyarat untuk tinggal landas, tinggal landas, menuju kedewasaan dan masa konsumsi tinggi.

Dasar pembedaan proses pembangunan ekonomi menjadi 5 tahap tersebut adalah karakteristik perubahan keadaan ekonomi, sosial dan politik yang terjadi. Menurut Rostow, pembangunan ekonomi atau proses transformasi suatu masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern merupakan suatu proses yang multidimensional. Pembangunan bukan berarti perubahan struktur ekonomi suatu negara yang ditunjukkan oleh menurunnya peran sektor pertanian dan peningkatan peranan sektor industri jasa.

Menurut Rostow, disamping perubahan seperti itu, pembangunan ekonomi berarti pula sebagai suatu proses yang menyebabkan antara lain:

1. Perubahan orientasi organisasi ekonomi, politik dan sosial pada mulanya berorientasi kepada suatu daerah menjadi berorientasi ke luar.
2. Perubahan pandangan masyarakat mengenai jumlah anak dalam keluarga, yaitu dari menginginkan banyak anak menjadi keluarga kecil.
3. Perubahan dalam kegiatan investasi masyarakat, dari melakukan investasi yang tidak produktif (menumpuk emas, membeli rumah dan sebagainya) menjadi investasi yang produktif.
4. Perubahan sikap hidup dan adat-istiadat yang terjadi kurang mernagsang pembangunan ekonomi (misalnya penghargaan terhadap waktu, penghargaan terhadap prestasi perorangan dan sebagainya). Tahapan perkembangan masyarakat dibagi menjadi: - Masyarakat Tradisional

Dalam suatu masyarakat tradisional, menurut Rostow tingkat produktifitas pekerja masih rendah, oleh karena itu sebagian besar sumber daya masyarakat digunakan untuk kegiatan sektor pertanian. Dalam sektor pertanian, struktur sosialnya bersifat hierarkis yaitu mobilitas vertikal anggota masyarakat dalam struktur sosial kemungkinan sangat kecil, bahwa kedudukan seseorang dalam masyarakat tidak akan berbeda dengan nenek moyang.

a. Tahap Pra Lepas Landas

Tahap pra lepas landas ini didefinisikan Rostow sebagai suatu masa transisi di mana masyarakat mempersiapkan dirinya untuk mencapai pertumbuhan atas kekuatan sendiri (*self-sustained growth*). Menurut Rostow pada tahap ini sesudahnya pertumbuhan ekonomi akan terjadi secara otomatis. Perubahan-perubahan yang dimaksud Rostow seperti kemampuan masyarakat untuk menggunakan ilmu pengetahuan modern dan membuat penemuan-penemuan baru yang bisa menurunkan biaya produksi, disamping itu harus ada pula orang-orang yang menggunakan penemuan baru. Rostow juga menunjukkan bentuk perubahan dalam kepemimpinan pemerintah dari masyarakat yang mengalami transisi. Untuk menjamin terciptanya pembangunan yang teratur,

reaktif yaitu bereaksi secara positif atas tekanan dari negara maju. Rostow yakin bahwa tanpa adanya tekanan maka modernisasi tidak akan terjadi secepat ini. - Tahap Tinggal Landas Pada tahap tinggal landas, pertumbuhan ekonomi selalu terjadi. Pada awal tahap ini terjadi perubahan yang drastis dalam masyarakat seperti revolusi politik, terciptanya kemajuan yang pesat dalam inovasi, berupa terbukanya pasar-pasar baru sebagai akibat dari perubahan-perubahan tersebut secara teratur akan tercipta inovasi-inovasi dan peningkatan investasi. Investasi yang semakin tinggi ini akan mempercepat laju pertumbuhan pendapatan nasional.

b. Menuju Kedewasaan

Tahap menuju kedewasaan oleh Rostow diartikan sebagai masa di mana masyarakat sudah secara efektif menggunakan teknologi modern pada hampir semua kegiatan produksi. Pada tahap ini sektor-sektor pemimpin baru akan muncul menggantikan sektor-sektor pemimpin lama yang akan mengalami kemunduran. Sektor-sektor pemimpin baru ini coraknya ditentukan oleh perkembangan teknologi, kekayaan alam, sifat-sifat dari tahap lepas landas yang terjadi dan juga oleh kebijaksanaan pemerintah. Selanjutnya Rostow juga mengemukakan pula karakteristik non ekonomis dari masyarakat yang telah mencapai tahap kedewasaan sebagai berikut: a.) struktur dan keahlian tenaga kerja mengalami perubahan. Perubahan sektor industri semakin penting, sedangkan sektor pertanian penting; b.) Sifat kepemimpinan dalam perusahaan mengalami perubahan. Peranan manajer profesional semakin penting dan menggantikan kedudukan pengusaha /pemilik; c.) Kritik-kritik terhadap industrialisasi mulai muncul sebagai akibat dari ketidakpuasan terhadap dampak industrialisasi. - Masa Konsumsi Tinggi

Masa konsumsi tinggi ini merupakan tahap terakhir dari teori pembangunan ekonomi Rostow. Pada tahap ini perhatian masyarakat telah lebih menekankan pada masalah-masalah yang berkaitan dengan konsumsi dan kesejahteraan masyarakat bukan lagi pada produksi. Pada tahap ini 3 macam tujuan negara yaitu: a.) Memperbesar kekuasaan dan pengaruh luar negeri dan kecenderungan ini bisa berakhir pada penjajahan terhadap bangsa lain; b.)

Menciptakan negara kesejahteraan dengan mengusahakan terciptanya pembagian pendapatan yang lebih merata lalui sistem pajak progresif c.) Meningkatkan konsumsi masyarakat melebihi kebutuhan pokok sandang pangan dan papan, meluti pula barang-barang konsumsi tahan lama dan barang-barang mewah.

2.1.5.2 Peranan Pengeluaran Pemerintah

Pemerintah memiliki peran dalam kehidupan bernegara yang dapat diklasifikasikan menjadi macam kelompok peranan (Dumairy, 1999 : 65) yaitu:

- a. Peranan alokasi, yakni peran pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang ada agar pemanfaatan bisa optimal dan mendukung efisiensi produksi. Kegagalan pasar dan eksternalitas mengundang pemerintah untuk turut campur dalam perekonomian. Pemerintah harus merencanakan peraturan dan mengatur penggunaan sumber daya ekonomi yang ada agar teralokasi secara efisiensi. Peran alokatif ini tidak cukup sekedar melibatkan pemerintah selaku pelindung masyarakat, tapi juga menuntut pengeluaran biaya.
- b. Peran distributif, yakni peran pemerintah dalam mendistribusikan sumberdaya, kesempatan dan hasil-hasil ekonomi secara adil dan wajar. Pemilikan sumber daya dan kesempatan ekonomi disetiap negeri sering tidak merata, baik di antara wilayah-wilayah Negara yang bersangkutan maupun diantara sektor-sektor ekonomi. Begitu pula dengan kecenderungan pembagian hasil-hasilnya. Kesenjangan pemilikan sumber daya dan kesempatan ekonomi akan mengkonsentrasikan kekuatan dan kekuasaan ekonomi di tangan segelintir pihak tertentu. Daya tawar (*bargaining position*) antara pelaku ekonomi menjadi tidak seimbang. Disisilain ketidak seimbangan daya tawar dapat melemahkan pasar Peran distributif pemerintah dapat ditempuh baik melalui jalur penerimaan maupun lewat jalur pengeluarannya. Di sisi penerimaan, pemerintah mengenakan pajak dan memungut sumber-sumber pendapatan lainnya untuk kemudian didistribusikan secara adil dan proporsional. Dengan pola serupa pula pemerintah membelanjakan pengeluarannya.

- c. Peran Stabilitatif, yakni peran pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian dan memulihkan jika berada dalam keadaan disequilibrium. Peranan ini bertolak dari kenyataan objektif sering tidak berdayanya pihak swasta mengatasi sejumlah masalah yang timbul, bahkan kadang-kadang kala ketidak berdayaan pihak swasta itu justru diciptakan sendiri secara subjektif oleh pemerintah, dalam arti pemerintah berpandangan pihak swasta tidak mampu mengatasi masalahnya.
- d. Peran dinamisatif, yakni peran pemerintah dalam menggerakkan proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh berkembang dan maju. Peran ini diwujudkan dalam bentuk perintisan kegiatan-kegiatan ekonomi tertentu. Argumentasi pemerintah bahwa ia harus berperan sebagai dinamisor didukung pula oleh sebuah premis yang dicanangkan sendiri. Karena dialah yang merencanakan dan memodali pembangunan, maka ia merasa paling bertanggung jawab atas pelaksanaan atas dasar itu ia merasa berhak melakukan apa saja yang menurutnya pantas ditempuh demi pembangunan.

Keempat macam peranan pemerintah tadi potensial dapat menimbulkan kesulitan penyerasian atau bahkan pertentangan kebijaksanaan. Sebagai contoh dalam kapasitas selaku stabilisator perekonomian daerah, pemerintah harus mengendalikan inflasi. Apabila hal itu ditempuh dengan cara mengurangi pengeluarannya, agar permintaan agregat terkendali sehingga tidak menambah memacu kenaikan harga-harga, maka porsi pengeluaran pemerintah untuk lapisan masyarakat atau sektor yang harus dibantu dapat dikurangi. Padahal justru dengan pengeluaran itulah pemerintah menjalankan peran distribusinya.

Menurut UUNo.3 Tahun 2004 belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Berdasar fungsinya belanja daerah terdiri dari belanja untuk pembangunan perumahan dan fasilitas umum, peningkatan kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, serta perlindungan sosial. (Adelfina,2015;18)

a. Hubungan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan terhadap Pembangunan Manusia

Menurut Michael P. Todaro 2000 (dalam Sanggelorang, 3) ada dua biaya pendidikan, yaitu; biaya-biaya pendidikan individual dan biaya-biaya pendidikan tidak langsung. Biaya pendidikan langsung individual ini yang kemudian berkenaan langsung pada pendapatan per kapita masyarakat. Biaya pendidikan langsung individual adalah segenap biaya moneter atau uang yang harus dipikul oleh siswa dan keluarganya untuk membiayai pendidikan.

Pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan mutlak diperlukan, mengingat pendidikan merupakan salah satu faktor yang dominan dalam upaya peningkatan kualitas penduduk. Dengan kondisi pendidikan penduduk yang baik dapat digambarkan dengan tingkat produktivitas penduduk yang tinggi, hal ini merupakan upaya dalam peningkatan kesejahteraan penduduk. Pengeluaran pemerintah dalam sektor pendidikan ini merupakan salah satu dari wujud *government expenditure*, dimana *government expenditure* merupakan kebijakan fiskal yang sebagian diarahkan untuk memberikan dana kepada masyarakat khususnya dalam bentuk dana pembangunan.

Menurut Sumarsono (2003:58) pendidikan berperan tingkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia), dalam menghadapi persaingan bebas, masyarakat membutuhkan dukungan semua pihak untuk menjadi SDM yang berkualitas sehingga diharapkan dapat menjadi masyarakat yang memiliki daya saing. Agar tidak tertinggal dengan masyarakat internasional maka peningkatan pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan potensi dasar masyarakat.

b. Hubungan Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Kesehatan terhadap Pembangunan Manusia

Undang-undang di Indonesia yang mengatur mengenai anggaran kesehatan adalah UU No 36 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah pusat dialokasikan minimal 5 persen dari APBN di luar gaji, sementara besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10 persen dari APBD di luar gaji.

Astri *et al* (2013:9) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah sektor kesehatan merupakan bentuk usaha pemerintah dalam pemenuhan hak dasar masyarakat. Pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan harus dipandang sebagai investasi dalam peningkatan sumber daya manusia, mengingat kesehatan merupakan faktor dominan kedua dalam upaya peningkatan kualitas penduduk. Menurut Lains dan Pasay dalam Astri *et al* (2013:9) menyatakan bahwa kekurangan kalori, gizi, ataupun rendahnya derajat kesehatan bagi penduduk akan menghasilkan kualitas manusia yang rendah dan mental yang terbelakang.

2.1.6 Teori Investasi

Teori Harrod-Domar mengemukakan bahwa model pertumbuhan ekonomi yang merupakan pengembangan dari teori Keynes, menitik beratkan pada peranan tabungan dan investasi sangat menentukan dalam pertumbuhan ekonomi daerah (Arsyad, 2010). Melalui investasi output akan meningkat dan menciptakan pendapatan, ia juga berpendapat agar jumlah investasi terus diperbesar. Hal ini untuk menjaga kelangsungan pekerjaan dalam jangka panjang. Mula-mula investasi akan meningkatkan output dengan kata lain akan meningkatkan penawaran. Selain itu investasi juga meningkatkan pendapatan dan ini berarti meningkatkan sisi permintaan. Selanjutnya ketika penawaran total dan permintaan total seimbang maka akan terjadi equilibrium perekonomian dan pada akhirnya akan membawa pertumbuhan ekonomi yang mantap (Jhingan, 2010).

Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian (Sukirno,2002).

Investasi adalah pengeluaran yang dilakukan oleh penanam modal (investor) yang menyangkut penggunaan sumber-sumber seperti peralatan, gedung, peralatan produksi, dan mesin-mesin baru lainnya atau persediaan yang diharapkan akan memberikan keuntungan dari investasi. (Samuelson dan Nordhaus, 1993).

Investasi adalah pengeluaran oleh sektor produsen (swasta) untuk pembelian barang dan jasa untuk menambah stok yang digunakan atau untuk perluasan pabrik. Investasi adalah mobilisasi sumber daya untuk menciptakan atau menambah kapasitas suatu produksi atau pendapatan dimasa yang akan datang. Tujuan utama investasi ada dua, yaitu mengganti bagian dari penyediaan modal yang rusak dan tambahan penyediaan modal yang ada (Boediono, 2013).

Berdasarkan Murni (2006), investasi adalah pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan masyarakat terutama pengusaha dan bisa juga dilakukan oleh pemerintah untuk membeli barang-barang modal ataupun peralatan-peralatan produksi. Sementara menurut Sukirno (2002) kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi (Sukirno, 2002), yakni:

- a. Investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja;
- b. Pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi
- c. Investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.

Investasi asing adalah salah satu cara bagi suatu negara untuk bertumbuh. Walaupun sebagian keuntungan dari investasi ini kembali ke negara asalnya, investasi asing dapat menambah persediaan modal domestik, yang akan meningkatkan produktivitas dan upah tenaga kerja. Terlebih lagi, investasi asing adalah satu cara bagi negara-negara miskin untuk mempelajari teknologi mutakhir yang di kembangkan dan digunakan di negara-negara lebih kaya (Mankiw, 2007).

Investasi sebagai pengeluaran modal untuk pembelian aset, baik aset fisik seperti pabrik, mesin dan peralatan tetap dan persediaan. Dalam analisis ekonomi investasi khususnya dihubungkan dengan investasi fisik. Investasi fisik menciptakan suatu aset baru yang akan menambah kapasitas produksi suatu

negara. Dengan begitu salah satu faktor untuk menaikkan pembangunan daerah adalah dengan tersedianya modal dalam bentuk investasi. Ketiadaan modal dalam pembangunan merupakan faktor penghambat terhadap pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Salah satu dari ciri negara sedang berkembang adalah tidak adanya modal yang mencukupi untuk pembangunan.

Dombusch dan Fisher berpendapat bahwa investasi adalah permintaan barang dan jasa untuk menciptakan atau menambah kapasitas produksi atau pendapatan di masa mendatang. Dalam neraca nasional atau struktur Produk Domestik Bruto (PDB) menurut penggunaannya investasi didefinisikan sebagai pembentukan modal tetap domestik (*domestic fixed capital formation*). Todaro (2000 : 15) mengemukakan bahwa persyaratan umum pembangunan ekonomi ada tiga yaitu: a.) Akumulasi modal, termasuk akumulasi modal baru dalam bentuk tanah, peralatan fisik dan sumber daya manusia, b.) perkembangan penduduk yang dibarengi dengan pertumbuhan tenaga kerja dan keahliannya, c.) kemajuan teknologi.

Peran investasi dalam perekonomian suatu negara oleh (Sir Roy F. Harrod 1939 dan Evsey Domar 1946 dalam Mangara, Tambunan 2010) atau dikenal dalam model Harrod Domar, melalui peningkatan laju tabungan, peningkatan *themarginal product of capital* atau penurunan laju depresiasi yang akan meningkatkan laju pertumbuhan output. Akumulasi modal melalui investasi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Implikasi dari model ini adalah untuk negara-negara berkembang, tenaga kerja merupakan sumber daya yang sangat melimpah, tetapi di sisi lain modal fisik tidak semelimpah tenaga kerja sehingga kemajuan ekonominya lebih lambat, untuk itu investasi harus didorong karena pemerintah tidak bisa lagi mengandalkan pertumbuhan ekonomi pada konsumsi, melainkan harus ditopang oleh investasi, khususnya di daerah. Pemberdayaan investasi daerah dalam rangka memacu pertumbuhan perekonomian daerah sangat memerlukan: a. Kerjasama antar daerah; b. Iklim investasi yang kondusif; c. Jaminan keamanan; d. Kepastian hukum.

Hubungan antara investasi dengan pertumbuhan ekonomi sangat erat kaitannya, ini karena investasi merupakan salah satu faktor yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Agar mengalami pertumbuhan yang pesat maka setiap perekonomian haruslah menabung dan menginvestasikan sebanyak mungkin bagian dari GNP. Apabila pertumbuhan ekonomi suatu negara mengalami peningkatan maka akan terjadi peningkatan kesempatan kerja, kesejahteraan, produktifitas dan distribusi pendapatan. Dalam teori klasik dengan model pertumbuhan Harrod-Domar, untuk memicu pertumbuhan ekonomi dibutuhkan investasi baru yang merupakan tambahan netto terhadap cadangan atau stok modal. Sehingga keberhasilan pembangunan di suatu daerah disamping ditentukan oleh besarnya pengeluaran pemerintah juga dipengaruhi oleh besarnya investasi di daerah. Investasi merupakan salah satu pilar pertumbuhan ekonomi (Sjafii,2009 dalam Sri Danawati dkk 2016). Investasi dapat menjadi titik tolak bagi keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan di masa depan karena dapat menyerap tenaga kerja, sehingga dapat membuka kesempatan kerja baru bagi masyarakat yang pada gilirannya akan berdampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.

Investasi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yaitu tingkat keuntungan investasi yang diperkirakan akan diperoleh, tingkat bunga, perkiraan mengenai keadaan ekonomi di masa depan dan perubahan perkembanganteknologi.

a. Investasi Publik

Menurut nasution (1997) dalam Tanjung (2007) investasi publik adalah investasi atau penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat ataupun pembangunan.

b. Investasi Swasta

Investasi swasta adalah investasi yang di lakukan oleh swasta yang menjadikan keuntungan sebagai prioritas utama tetapi secara tidak langsung juga akan

berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat (Nasution, 1997 dalam Tanjung, 2007).

2.1.6.1 Hubungan Investasi dengan Pembangunan Manusia

Menurut Noor (2015:47), pada dasarnya, hampir semua bentuk investasibermanfaatbagi kepentingan publik atau umum karena investasi menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Investasi juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.Contohnya adalah investasi dibidang pendidikan dan sumber daya manusia, investasi dibidang kesehatan, investasi dibidang infrastruktur (jalan, jembatan, pelabuhan, pasar, dan sebagainya), dan investasi lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat luas (Noor, 2015).

Menurut Sukirno (2000), kegiatan investasi memungkinkan suatumasyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Sehingga pembangunan manusia nantinya juga akan meningkat (Sukirno, 2000).



2.2 Penelitian Sebelumnya

No.	Nama Penelitian	Judul	Variabel	Metode	Hasil
1	Adi Widodo, Waridin, dan Johanna Maria K. (2011)	Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Peningkatan Pembangunan Manusia di Jawa Tengah.	Indeks Pembangunan Manusia, Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan.	Analysis Path dan Analisis regresi dengan variabel intervening dan analisis jalur.	Dari hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa apabila pengeluaran pemerintah tidak ditujukan untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia, maka pengentasan kemiskinan tidak akan terwujud. Dan ini dapat merambat dalam kesehatan dan pendidikan penduduk miskin karena semakin tidak terjangkau. Lingkaran setan inilah yang menyebabkan sulitnya pemerintah dalam mengurangi kemiskinan terutama kebijakan pemerintah yang dijalankan bu-kan yang kebija-kan <i>pro poor</i> .
2	Denni Sulistio Mirza (2012)	Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia.	Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Realisasi Belanja Modal	Analiss panel data dengan pendekat-an Correlated Fixed Effect (Hauss-man Test)	Dari hasil analisis yang telah dilakukan peneliti kemiskinan mempunyai pengaruh negatif dan signifikan pada $\alpha=5\%$ yang artinya di jawa tengah kemiskinan semakin menurun dan IPM meningkat. Selanjutnya per-tumbuhan eko-nomi

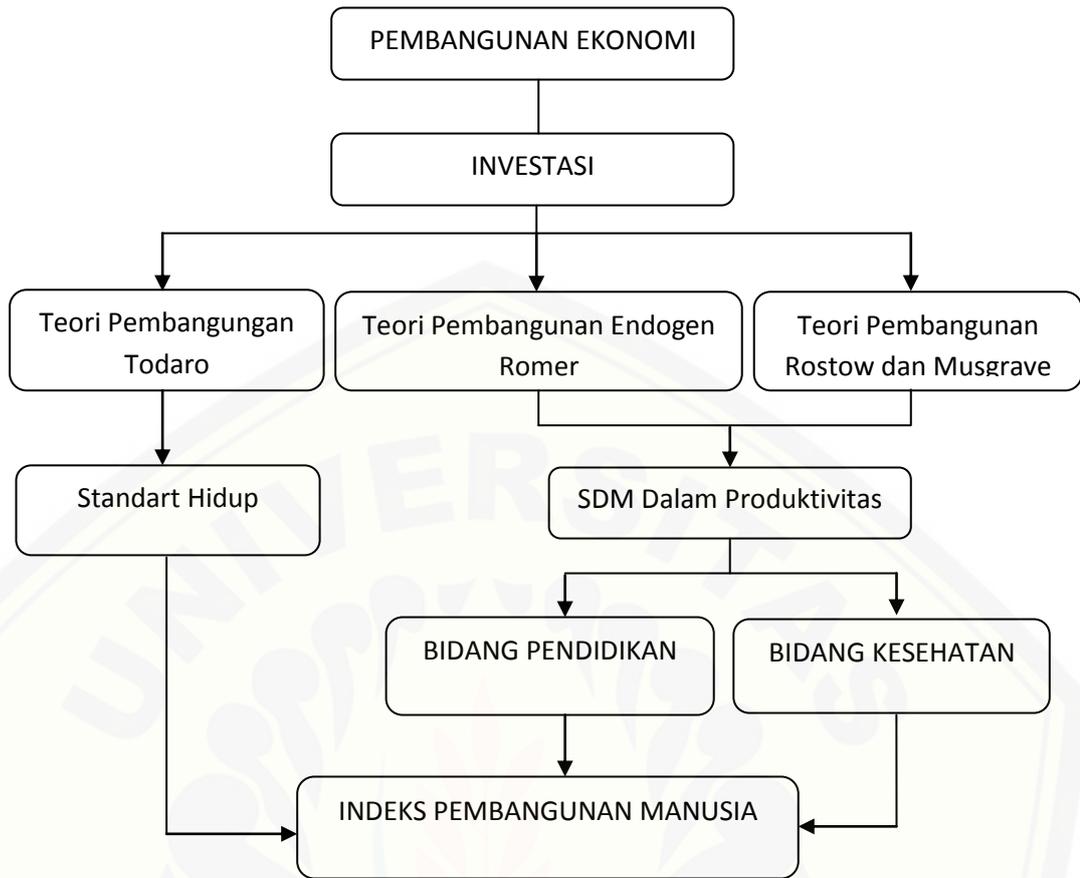
					dan be-lanja modal juga memiliki pengaruh positif dan signifikan yang artinya IPM di Jawa Tengah mengalami peningkatan. Oleh karena itu dilihat dari peningkatan IPM artinya pemerintah berhasil merealisasikan belanja modal.
3	Septian Jefri Alif Utama (2015)	Pengaruh PDRB, Belanja Modal dan Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Karasedinan Besuki)	Indeks Pembangunan Manusia, Kemiskinan, PDRB, dan Realisasi Belanja Modal	Correlated Fixed Effect (Hausman Test) dan Analisis Jalur.	Dalam hasil analisis dengan kedua metode tersebut, dalam pengujian metode tersebut terjadi kesamaan hasil dalam variabel yang sama. Tidak ada perbedaan dalam pengujian variabel tersebut dengan metode yang berbeda. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah dalam menurunkan kemiskinan harus dapat di tingkatkan pula PDRB nya. Karena PDRB akan mempengaruhi konsumsi penduduk. Dan pengeluaran pemerintah dalam belanja modal harus tepat sasaran dengan langsung menyentuh masyarakat, hal ini bisa dilakukan dengan pembangunan infrastruktur.
4	Yana Ulfah (2016)	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan, dan Indeks	Analisis panel data dengan pendekatan Correlated Fixed Effect (Hausman)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Alokasi Anggaran Bidang Pendidikan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap IPM dan Alokasi Anggaran

		Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kalimantan Timur	Pembangunan Manusia	Test)	Bidang Kesehatan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap IPM.
5	Mardiyand Yudha Pratama (2018)	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Sektor Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusiadi 35 Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Sektor Kesehatan, dan Indeks Pembangunan Manusia	Analiss panel data dengan pendekatan Correlated Fixed Effect (Hausman Test)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Sektor Kesehatan Berpengaruh Terhadap Indeks Pembangunan Manusiadi 35 Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016

2.3 Kerangka Konsep

Berdasarkan hasil penelitian Mardiyand Yudha Pratama (2018) menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Sektor Kesehatan Berpengaruh Terhadap IPM. Namun hasil berbeda pada penelitian Yana Ulfah (2016) yang menyatakan bahwa Alokasi Anggaran Bidang Pendidikan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap IPM dan Alokasi Anggaran Bidang Kesehatan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap IPM. Menurut Teori Rostow menyatakan bahwa peranan pemerintah dapat meningkatkan IPM, namun hal itu juga dapat menimbulkan kesulitan penyerasian atau bahkan pertentangan kebijaksanaan. Apabila hal itu ditempuh dengan cara mengurangi porsi pengeluaran pemerintah untuk lapisan masyarakat atau sektor yang harus dibantu. Padahal justru dengan pengeluaran pendidikan dan kesehatan pemerintah menjalankan peran distribusinya.

Tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang dapat menggambarkan kondisi pembangunan ekonomi, teori klasik adam smith menyatakan bahwa modal memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi, dan akumulasi modal menjadi salah satu faktor yang menyebabkan cepat atau lambatnya pertumbuhan ekonomi. Akumulasi modal salah satunya dapat terbentuk melalui adanya investasi, investasi dibedakan menjadi investasi pemerintah dan investasi swasta. Investasi pemerintah dalam penelitian ini berupa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan. Menurut teori dari Todaro tentang modal manusia, ia menyatakan bahwa modal manusia merupakan investasi produktif terhadap pengetahuan, keterampilan, kesehatan dan lokasi, sesuai dengan dasar teori tersebut maka pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan dan lokasi dapat mempengaruhi kualitas SDM. Berikut Kerangka Konsep dalam penelitian ini:



Gambar 2.1 Kerangka Konsep

2.4 Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) di BAKORWIL V Provinsi Jawa Timur;
2. Pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) di BAKORWIL V Provinsi Jawa Timur;
3. Investasi swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) di BAKORWIL V Provinsi Jawa Timur.

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *explanatory*, Herjanto (2007:96) menjelaskan bahwa metode ini beranggapan bahwa terdapat hubungan antara variabel bebas (independen) dengan variabel terikat (dependen) yang dipengaruhinya.

3.1.2 Waktu dan Lokasi Penelitian

Data dalam penelitian ini yaitu data *time series* tahun 2010 sampai 2016 dan data *cross section* dari 7 Kabupaten di Provinsi Jawa Timur, yaitu Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Lumajang, Jember, Situbondo, Bondowoso, dan Banyuwangi.

3.1.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang telah disusun dan dipublikasikan. Data tersebut antara lain:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di 7 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2016.
2. Pengeluaran Pemerintah menurut bidang pendidikan di 7 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2016.
3. Pengeluaran Pemerintah menurut bidang kesehatan di 7 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2016.
4. Investasi swasta di 7 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2016.

3.2 Metode Analisis

3.2.1 Analisis Regresi Data Panel

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dalam melihat pengaruh pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dan pendidikan dan investasi swasta terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Bakorwil V Provinsi Jawa Timur. Data panel (*pooled data*) adalah sebuah kumpulan data deret waktu

(*time series*) dan data deret hitung (*cross section*) pada periode waktu tertentu. Data panel sangat bermanfaat, karena dapat mendalami kegiatan pelaku ekonomi, tidak hanya antara individu tetapi juga perilaku ekonomi lintas-waktu, data panel juga digunakan untuk alasan teknis-pragmatis, yaitu alasan permasalahan ketersediaan data (Ekananda, 2016:1-2). Adapun fungsi model ekonomi dari variabel-variabel penelitian, sebagai berikut:

$$IPM = f (PPP, PPK, InS)$$

Selanjutnya mentransformasikan fungsi tersebut ke dalam model ekonometrika, sebagai berikut:

$$IPM = \alpha + \beta_1 PPP_{i,t} + \beta_2 PPK_{i,t} + \beta_3 InS_{i,t} + \epsilon_{i,t}$$

Keterangan:

IPM	= Indeks Pembangunan Manusia
PPP	= Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan
PPK	= Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan
InS	= Investasi Swasta
α	= Intercept
β_{it}	= Koefisien Variabel
ϵ	= <i>Error Term</i>
i	= 1,2,..., N (banyaknya sampel/observasi)
t	= 1,2,..., T (banyaknya waktu)

3.2.2 Estimasi Regresi Data Panel

Dalam mengestimasi model regresi data panel terdapat tiga macam metode pendekatan, antara lain:

1. Metode *Common Effect* atau *Pooled Least Square* (PLS)

Estimasi dalam metode ini merupakan metode estimasi yang paling sederhana yang mengkombinasikan antara data *Time Series* dan *Cross Section* dengan asumsi intercept dan koefisien slope yang konstan (tidak ada dimensi deret antar waktu). Dengan kata lain, regresi data panel yang dihasilkan akan berlaku untuk setiap variabel individu. Struktur model ini mengasumsikan tidak

adanya perbedaan karakteristik IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur selama waktu observasi. Dalam PLS estimator akan menghasilkan *intercept* α dan *slope* β sama untuk setiap individu ($\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \dots = \alpha_i$ dan $\beta_{k1} = \beta_{k2} = \beta_{k3} = \dots = \beta_{ki}$), dimana k merupakan jenis variabel dan i adalah observasi ke- i . Persamaan yang digunakan, sebagai berikut:

$$IPM_{i,t} = \alpha + \beta_1 PPP_{i,t} + \beta_2 PPK_{i,t} + \beta_3 InS_{i,t} + \epsilon_{i,t}$$

2. Metode *Fix Effect Model* (FEM)

Metode *Fixed Effect* merupakan suatu metode yang menjelaskan bahwa intersep pada regresi dapat dibedakan antara individu dan dianggap memiliki karakteristik yang berbeda yang biasanya menggunakan variabel *dummy*. Persamaan yang digunakan, sebagai berikut:

$$IPM_{i,t} = \alpha + \beta_1 PPP_{i,t} + \beta_2 PPK_{i,t} + \beta_3 InS_{i,t} + \epsilon_{i,t}$$

Struktur model ini mengasumsikan adanya perbedaan karakteristik IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur selama waktu observasi. Penggunaan kata *fixed* untuk menunjukkan bahwa faktor penyebab heterogenitas disetiap individu diasumsikan tetap sepanjang waktu observasi. Pengaruh yang tetap dilihat dari penggunaan nilai yang sama (nilai 1) sepanjang waktu. Nilai 1 ditempatkan pada individu tertentu dan nol untuk invidu lainnya. Konsep ini lah yang biasa disebut dengan variabel *dummy*. Secara umum struktur model dalam bentuk *Least Square Dummy Variabel* (LSDV), sebagai berikut:

$$IPM_{i,t} = \alpha_i + \alpha_1 D_1 + \alpha_2 D_2 + \alpha_3 D_3 + \beta_1 PPP_{1i} + \beta_2 PPK_{2i} + \beta_3 InS_{3i} + \epsilon_{i,t}$$

3. Metode *Random Effect Model* (REM)

Dalam *Random Effect Model* setiap persamaan mempertimbangkan karakteristik individu. Penentuan α dan β didasarkan pada asumsi bahwa *intercept* α terdistribusi *random* antar unit μ_i . Dengan kata lain, *slope* memiliki nilai yang tetap tetapi *intercept* bervariasi untuk setiap individu (Ekananda, 2016:126). Sehingga persamaan dalam model ini, sebagai berikut:

$$IPM_{it} = \alpha_{1i} + \beta_{PPP}PPP_{it} + \beta_{PPK}PPK_{it} + \beta_{InS}InS_{it} + \mu_{it}$$

Dapat dilihat bahwa *slope* β memiliki nilai tetap, tetapi α_{1i} memiliki nilai yang bervariasi karena pengaruh *random* ϵ_i terhadap *intercept* α_i ($\alpha_{1i} = \alpha_i + \epsilon_i$) yang bernilai tetap.

3.2.2 Uji Penentuan Model

Terdapat tiga macam uji dalam penentuan model data panel, antara lain:

A. Uji Chow

Uji ini bertujuan untuk memilih apakah model yang digunakan Pooled Least Square Model (PLS) atau Fixed Effect Model (FEM). Dalam pengujian ini terdapat hipotesis yaitu jika *p-value* lebih kecil dari nilai α maka menggunakan Fixed Effect Model (FEM) dan jika *p-value* lebih besar dari nilai α maka model terbaik adalah Pooled Least Square Model (PLS). Nilai α yang digunakan sebesar 5% (0,05).

B. Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk mengetahui antara *Fixed Effect Model* (FEM) atau *Random Effect Model* (REM). Dalam pengujian ini dilakukan dengan hipotesis yaitu jika *p-value* lebih kecil dari nilai α maka model terbaik adalah menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM) dan jika *p-value* lebih besar dari nilai α maka menggunakan *Random Effect Model* (REM). Nilai α yang digunakan sebesar 5% (0,05).

C. Uji Lagrange Multiplier

Uji ini bertujuan untuk memilih antara *Random Effect Model* (REM) dan *Pooled Least Square Model* (PLS) digunakan *The Breusch-Pagan LM Test*. *The Breusch-Pagan LM Test* ini didasarkan pada distribusi Chi square dengan derajat bebas sebesar satu. Jika hasil *Breusch-Pagan LM* statistik lebih besar dari nilai X^2 (1), maka *Random Effect Model* lebih baik daripada *Pooled Least Square Model*.

3.2.3 Uji Statistik

A. Uji F Statistik

Uji F digunakan untuk mengetahui hubungan antara pengeluaran pemerintah menurut bidang pendidikan dan kesehatan, investasi swasta terhadap IPM secara simultan, dengan persamaan sebagai berikut (Gujarati, 2010: 309) :

$$F = \frac{R^2/(k-1)}{(1-R^2)(n-k)}$$

Keterangan:

- F : Pengujian secara simultan
 R^2 : Koefisien determinasi berganda
 k : Banyaknya variabel
 n : Banyaknya observasi (sampel)
 k : Derajat bebas pembilang
 n-k : Derajat bebas penyebut

Perumusan Hipotesis:

H_0 : $b_1, b_2, b_3 = 0$, artinya bersama-sama variabel bebas yaitu pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan, investasi swasta tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat yaitu indeks pembangunan manusia (IPM);

H_0 : $b_1, b_2, b_3 \neq 0$, artinya bersama-sama variabel bebas yaitu pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan, investasi swasta memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat yaitu IPM.

Kriteria Pengujian:

- a. Jika probabilitas $F_{hitung} \leq$ tingkat signifikan (α) 5%, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti ada pengaruh antar variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan, investasi swasta secara bersama-sama terhadap variabel IPM;

- b. Jika probabilitas $F_{hitung} >$ tingkat signifikan (α) 5%, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, yang berarti tidak ada pengaruh antar variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan, investasi swasta secara bersama-sama terhadap variabel IPM.

B. Uji t Statistik

Uji t digunakan untuk menguji hubungan regresi secara parsial yaitu melihat kuat tidaknya pengaruh masing-masing variabel bebas secara terpisah terhadap variabel terikat (Gujarati, 2010: 309). Rumus t hitung sebagai berikut:

$$t = \frac{b_i}{Sb_i}$$

Keterangan:

t : t hitung (pengujian secara parsial)

b_i : koefisien regresi linier berganda

Sb_i : standar error devisiasi

Perumusan Hipotesis:

1. $H_0 : b_1 = 0$, artinya secara parsial tidak ada pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel pengeluaran pemerintah menurut bidang pendidikan dan kesehatan, investasi swasta terhadap variabel IPM;
2. $H_0 : b_1 \neq 0$, artinya secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel pengeluaran pemerintah menurut bidang pendidikan dan kesehatan, investasi swasta terhadap variabel IPM.

Kriteria Pengujian:

1. Jika probabilitas $t_{hitung} \leq \alpha$ ($\alpha = 5\%$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti ada pengaruh antara variabel bebas yaitu pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, kesehatan dan investasi swasta secara parsial terhadap variabel terikat yaitu IPM;

2. Jika probabilitas $t_{hitung} > \alpha$ ($\alpha = 5\%$) maka H_0 diterima dan H_a ditolak, yang berarti tidak ada pengaruh secara nyata antara variabel bebas yaitu pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, kesehatan dan investasi swasta secara parsial terhadap variabel terikat yaitu IPM.

C. Uji Koefisien Determinan Berganda (R^2)

Uji koefisien determinasi atau uji R^2 digunakan untuk mengetahui kontribusi variabel bebas terhadap perubahan variabel terikat, nilai R^2 terletak diantara 0 dan 1 ($0 < R^2 < 1$). Kecocokan model dikatakan lebih baik apabila nilai R^2 semakin dekat dengan 1. Rumus yang digunakan, sebagai berikut:

$$R^2 = \frac{ESS}{TSS}$$

$$R^2 = \frac{b_1 \sum x_1 y + b_2 \sum x_2 y + b_3 \sum x_3 y}{\sum y^2}$$

Keterangan:

- R^2 : koefisien determinan
ESS : jumlah kuadrat yang dijelaskan
RSS : jumlah kuadrat yang residual
TSS : ESS + RSS

3.2.4 Uji Asumsi Klasik

A. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas merupakan pengujian yang digunakan untuk melihat apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen, salah satu tanda terjadinya multikolinearitas yaitu apabila nilai R^2 dalam estimasi model empiris sangat tinggi, tetapi secara individual banyak dari variabel independen tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.

B. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk melihat masalah heteroskedastisitas yang terjadi apabila variabel pengganggu mempunyai varian yang tidak konstan atau berubah-ubah, masalah ini lebih sering menyerang model empiris yang menggunakan data cross section dari pada data time series. Terdapat cara untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas, yaitu dengan melakukan uji *white heteroschedasticity*. Caranya dengan membandingkan nilai X^2 dengan nilai X^2 tabel dan nilai $\text{Obs} \cdot R^2$ dengan ϵ . Jika nilai $X^2 <$ dari pada nilai X^2 tabel dan nilai $\text{Obs} \cdot R^2 > \epsilon$ (5%) sehingga model bisa dikatakan tidak terdiaknosa masalah heteroskedastisitas (Gujarati, 2013:463).

C. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t - 1$. Terdapat beberapa cara untuk mengetahui adanya permasalahan autokorelasi, yaitu (1) metode grafik, (2) metode h -statistik, (3) uji Durbin Watson, (4) uji Lagrange Multiplier (Gujarati 2000:215).

D. Uji Normalitas

Uji Normalitas dilakukan untuk melihat apakah nilai residual dari model yang dibentuk berdistribusi normal atau tidak. Hipotesis yang digunakan dalam uji normalitas pendekatan Jarque-berra *test*, yaitu (Wardhono, 2004):

1. Bila nilai $JB_{hitung} \geq$ nilai X^2 tabel atau nilai probabilitas $J-B_{hitung} \leq$ nilai probabilitas kritis ($\alpha = 5\%$), maka hipotesis yang menyatakan bahwa residual *error term* adalah berdistribusi normal ditolak;
2. Bila nilai $JB_{hitung} \leq$ nilai X^2 tabel atau nilai probabilitas $J-B_{hitung} \geq$ nilai probabilitas kritis ($\alpha = 5\%$), maka hipotesis yang menyatakan bahwa residual *error term* adalah berdistribusi normal.

3.3 Definisi Operasional

Variabel operasional merupakan variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yang diambil dari kebutuhan data dan alat analisis yang dipergunakan. Definisi Operasional adalah penjelasan dari masing-masing variabel tersebut diantaranya :

a. Pengeluaran Pendidikan

Pengeluaran Pendidikan merupakan Realisasi Pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan dalam APBD berdasarkan jenis pengeluaran belanja langsung, yang dinyatakan dalam satuan rupiah.

b. Pengeluaran Kesehatan

Pengeluaran Pendidikan merupakan Realisasi Pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan dalam APBD berdasarkan jenis pengeluaran belanja langsung, yang dinyatakan dalam satuan rupiah.

c. Investasi Swasta

Investasi Swasta merupakan posisi kredit perbankan dan valuta asing bank umum menurut jenis penggunaan investasi, yang dinyatakan dalam satuan rupiah.

d. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia yaitu indeks yang mengukur pencapaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran hidup, Indeks Pembangunan manusia dibangun melalui tiga dimensi dasar yaitu kesehatan diukur dengan angka harapan hidup waktu lahir, Pendidikan diukur dengan melek huruf dan rata-rata lama sekolah dan Hidup layak diukur dengan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok dilihat dari rata-rata pengeluaran perkapita, yang dinyatakan dalam angka.

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan penelitian diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengeluaran Pemerintah di bidang pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di wilayah BAKORWIL V Provinsi Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa apabila Pengeluaran Pemerintah di bidang pendidikan mengalami peningkatan maka akan meningkatkan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di wilayah BAKORWIL V Provinsi Jawa Timur.
2. Pengeluaran Pemerintah di bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di wilayah BAKORWIL V Provinsi Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa apabila Pengeluaran Pemerintah di bidang kesehatan mengalami peningkatan maka akan meningkatkan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di wilayah BAKORWIL V Provinsi Jawa Timur.
3. Investasi Swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di wilayah BAKORWIL V Provinsi Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa apabila Investasi Swasta mengalami peningkatan maka akan meningkatkan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di wilayah BAKORWIL V Provinsi Jawa Timur.

5.2 Saran

Saran yang diperoleh dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pengeluaran Pemerintah sektor Pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB dan IPM di Provinsi Jawa Timur, hal dapat diartikan pengpengeluaran anggaran bidang pendidikan di Jawa Timur memiliki

dampak atas IPM. sehingga perlunya dinas terkait mengawasi penggunaan dana tersebut sehingga lebih tepat sasaran.

2. Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan juga berpengaruh nyata terhadap IPM di Provinsi Jawa Timur. Pembangunan bidang kesehatan di Provinsi Jawa Timur sedang mengalami tahap perkembangan menengah, dimana pemerintah harus menyediakan lebih banyak sarana publik seperti kesehatan untuk meningkatkan IPM. Sarana kesehatan dan jaminan kesehatan harus dirancang lebih baik melalui pengeluaran pemerintah.
3. Peranan Pemerintah dan swasta harus saling mendukung dalam hal peningkatan human capital yang bersifat investasi sumber daya manusia (SDM) untuk memicu percepatan pembangunan ekonomi di wilayah Provinsi Jawa Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, 2010. *Indeks Pembangunan Manusia Indonesia*. Universitas Islam Indonesia.
- Adelfina, 2015. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Belanja Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kota Provinsi Bali Periode 2005-2013*. Jurnal Ekonomi Pembangunan: Vol 5. No. 10, 2016. ISSN: 2303-0178. Universitas Udayana, Bali.
- Adisasmita, 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Afrizal, Fitrah. 2013. *Analisis Pengaruh Tingkat Investasi, Belanja Pemerintah dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2001-2011*. E-jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Makassar.
- Ajija, Shochrul Retal. 2011. *Cara Cerdas Menguasai Eviews*. Salemba Empat: Jakarta.
- Arsyad, 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Astri, Meylina et al. 2013. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia*. Jurnal Pendidikan dan Ekonomi Bisnis Vol11, No.1. UNJ. Jakarta
- Ayun, Rinda dkk, 2013. *Pola Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur Tahun 2007-2011*. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara
- Badan Pusat Statistik, 2014. *Statistik Keuangan Kabupaten/Kota 2005-2014*. Katalog BPS Pusat. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2014. *Jember dalam angka 2005-2014*. Katalog BPS: BPS Kabupaten Jember.
- 2014. *Banyuwangi dalam angka 2005-2014*. Katalog BPS: BPS Kabupaten Banyuwangi.
- 2014. *Situbondo dalam angka 2005-2014*. Katalog BPS: BPS Kabupaten Situbondo.
- 2014. *Bondowoso dalam angka 2005-2014*. Katalog BPS: BPS Kabupaten Bondowoso.
- Boediono, 2013. *Pengantar Ilmu Ekonomi, Edisi kedua*, Cetakan kedua puluh delapan, BPFE, Yogyakarta

- Budi Susanto, Arif dkk, 2012. *Pengaruh Indeks Pemangunan Manusia (IPM) dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lamongan*. E-Jurnal Ekonomi Universitas Surabaya.
- Danawati, Sri dkk, 2016. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Kesempatan Kerja, Pertumbuhan Ekonomi Serta Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali*. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 5.7 (2016) : 2123-2160
- Daryanto, Arif dan Hafizrianda. 2010. *Model-model Kuantitatif untuk Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah: Konsep dan Aplikasi*. Bogor: PT Penerbit IPB Press
- Dumairy. 1999. *Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta: Bagian: Penerbitan Erlangga.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*, Badan. Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Gujarati, Damodar. 2004. *Dasar-dasar Ekonometrika : Edisi Keempat*. Jakarta: Salemba Empat
- Gujarati, Damodar. 2003. *Ekonometrika Dasar : Edisi Keenam*. Jakarta: Erlangga
- Gujarati, Damodar. 2010. *Dasar-dasar Ekonometrika : Edisi Kelima, Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat
- Hukubun, Mefi dkk, 2013. *Pengaruh Investasi Pemerintah dan Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Tenaga Kerja Propinsi Sulawesi Utara tahun 2002-2012*. E-jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Izzah, Nurul. 2015. *Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Inflasi Terhadap pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Riau Tahun 1994-2013*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan. Volume 1, No.2.
- Jefri alif, Septian. 2015. *Pengaruh PDRB, Belanja Modal dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Eks Karesidenan Besuki*. E-jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
- Jhingan, M.L, 2003. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- , 2010. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Terjemahan. Penerbit Rajawali. Jakarta
- Mankiw, 2007. *Makroekonomi. Edisi Keenam*. Jakarta: Penerbit Erlangga: Jakarta
- , 2008. *Makro Ekonomi : Edisi Keenam*. Cetakan kedua Penerbit Erlangga: Jakarta.

- Mardiyand Yudha Pratama, 2018. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Sektor Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusiadi 35 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016*. Universitas Diponegoro Semarang
- Masjkuri, 2007. *Perbaikan Kampung Komperhensif dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Sosialserta Kemandirian Masyarakat Miskin Kampung Kumuh di Kota Surabaya*. Jurnal Damandiri. Universitas Airlangga Surabaya.
- Mill, John Stuart. 1871. *Utilitarianism*. Longmas, Green, Reader and Dyer: London.
- Patriotika, 2011. *Analisis Indeks Pembangunan Provinsi Jawa Tengah*. Jurusan Ekonomi Pembangunan UPN "V" Yogyakarta
- Pratama,Rahardja dan Mandala, Manurung, 2008. *Teori Ekonomi Makro: SuatuPengantar*. Lembaga Penerbit FE UI
- Sanusi, Bachrawi. 2004. *Pengantar Ekonomi Pembangunan*. Jakarta:Rineka Cipta.
- Prijambodo, 1995. *Teori Pertumbuhan Endogen: TinjauanTeoritis Singkat dan Implikasi Kebikasaannya*.
- Rinda Ayun Anggraini dan Luthfi Muta'ali. 2013. *Pola HubunganPertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Manusia di Provinsi JawaTimur tahun 2007 – 2011*. Jurnal. Universitas Brawijaya. Malang.
- Samuelson dan Nordhaus, 1993. *Mikro Ekonomi*, Terjemahan Drs. Haris Munandar DKK, Edisi ke-14, Erlangga, Jakarta.
- Sanggalorang, S. M. M., dkk., 2015, *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Utara*, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol.15 No.2, Juli, hal 1-11.
- Santoso, 2013. *Ekonomi Pembangunan: Problematika dan Pendekatan*, Jakarta: Salemba Empat
- Sarwedi dan Siti Mariyam, 2013. *Analisis Ketimpangan Pendapatan Antar DaerahWilayah pada Wilayah Eks Karesidenan Besuki Provins jawa Timur*. E-JurnalEkonomi dan Bisnis Universitas Jember.
- Septian Jefri, 2015. *Pengaruh PDRB, Belanja Modal Dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus: Eks. Karesidenan Besuki)*. Artikel Ilmiah Mahasiswa 2015. Universitas Jember
- Singarimbun, N & Sofyan, E. 1995. *MetodePenelitian Survai*. Jakarta: LPFE-UI
- Soetriono, 2007. *Makro Ekonomi Dasar*. Jember : Unej Press.

- Sri Danawati dkk, 2016. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi terhadap Kesempatan Kerja, Pertumbuhan Ekonomi serta Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali*. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol 3 no 1. Universitas Udayana. Bali
- Sukirno,Sadono. 2002. *Teori Mikro Ekonomi*. Cetakan Keempat Belas. Rajawali Press: Jakarta.
- , 2003. *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*. Jakarta : PT. Salemba Empat.
- , 2006. *Ekonomi Pembangunan :Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*.Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- , 2012. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sumanto, 2012. *Teori Oraganisasi dan Administrasi*. Jakarta: Salemba Empat
- Sumarsono, 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia Teori dan Kebijakan Publik*.Jogyakarta : Graha Ilmu.
- Sun'an, 2015. *Ekonomi Pembangunan*. Mitra Wacana Media
- Tanjung, 2007. *Akuntabilitas Pemerintah Daerah Konsep dan Aplikasi Sesuai Standar Pemerintah*. Bandung: Alfabetha
- Tambunan, Manggara, 2010. *Menggagas Perubahan Pendekatan Pembangunan*. Penerbit Graha Ilmu : Yogyakarta.
- Tambunan, Tulus, 2003. *Perekonomian Indonesia : beberapa masalah penting*. Penerbit
Ghalia Indonesia : Jakarta
- .. 2009. *Perekonomian Indonesia :bebrapa masalah penting*. Penerbit Ghalia Indonesia :jakarta
- Todaro, Michael, 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga : Edisi Ketujuh*.Penerbit Erlangga : Jakarta
- , 2003. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga, Edisi Kedelapan*, Jakarta: Erlangga.
- , 2004. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Todaro,M.P.dandan S.C.Smith. 2011. *Pembangunan Ekonomi*. Edisi ke Sebelas Jilid I. Jakarta:Erlangga.

UNDP, 1993. *Human Development Report 1990*. New York : Oxford University Press

UNICEF 2012. *Indonesia Laporan Tahunan*. Geneva: UNICEF

Widarjono, Agus. 2005. *Ekonometrika Teori dan Aplikasinya*, Edisi Pertama. Yogyakarta: Ekonisia.

Yana Ulfah, 2016. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kalimantan Timur*. Universitas Lambung Mangkurat

Website : <https://jatim.bps.go.id/>

<https://jember.bps.go.id/>

<https://bondowoso.bps.go.id/>

<https://banyuwangi.bps.go.id/>

<https://situbondo.bps.go.id/>

<https://bpm.jatimprov.go.id/>

Lampiran 1. Rekapitulasi Data

KabKota	Tahun	X1	X2	X3	Y
kab lumajang	2010	95759	325247	212859	59,62
kab lumajang	2011	107056	561957	210305	60,72
kab lumajang	2012	125604	544505	162635	61,31
kab lumajang	2013	159431	659998	128016	61,87
kab lumajang	2014	188891	690459	130642	62,33
kab lumajang	2015	229108	798642	132759	63,02
kab lumajang	2016	275338	75205	133747	63,56
kab jember	2010	167924	552401	224484	63,71
kab jember	2011	204949	907559	323817	64,33
kab jember	2012	227944	1050270	483274	64,95
kab jember	2013	300305	1186384	598411	65,53
kab jember	2014	436438	1165439	817681	66,12
kab jember	2015	506495	1276405	920799	66,6
kab jember	2016	524426	212901	891696	67,07
kab situbondo	2010	63484	261942	5332	63,06
kab situbondo	2011	98280	383581	15820	63,69
kab situbondo	2012	111159	440418	28368	64,26
kab situbondo	2013	127818	488790	83961	64,67
kab situbondo	2014	172683	612741	103136	71,5
kab situbondo	2015	227263	615759	570604	65,73
kab situbondo	2016	280367	548034	115339	66,07
kab bondwoso	2010	87853	279862	159674	61,26
kab bondwoso	2011	110532	445957	210703	62,11

kab bondwoso	2012	116703	443122	105398	62,94
kab bondwoso	2013	125381	508402	75437	63,81
kab bondwoso	2014	140276	573362	39294	64,98
kab bondwoso	2015	204889	637744	63029	65,39
kab bondwoso	2016	260757	690216	67196	65,78
kab banyuwangi	2010	65881	186850	308670	67,8
kab banyuwangi	2011	84293	344766	308670	68,36
kab banyuwangi	2012	154041	816841	282762	68,89
kab banyuwangi	2013	191542	809353	204781	69,58
kab banyuwangi	2014	242064	920889	204781	70,53
kab banyuwangi	2015	316597	1012134	240959	71,02
kab banyuwangi	2016	391129	1103380	409639	71,44
kab probolinggo	2010	75236	319644	212298	63,12
kab probolinggo	2011	89936	488613	226470	63,84
kab probolinggo	2012	126430	550373	227964	64,35
kab probolinggo	2013	152839	578998	229649	65,19
kab probolinggo	2014	195087	636727	231749	65,84
kab probolinggo	2015	245351	695302	232498	66,2
kab probolinggo	2016	304337	635666	233794	66,97
kota probolinggo	2010	56058	131934	157595	67,3
kota probolinggo	2011	81824	194520	175978	68,14
kota probolinggo	2012	78301	197114	243017	68,93
kota probolinggo	2013	92889	214697	254827	70,05
kota probolinggo	2014	108120	253450	259658	70,49
kota probolinggo	2015	131967	311367	261749	71,01
kota probolinggo	2016	115424	211931	263846	71,5

Lampiran 2

Hasil Analisis Data Panel Menggunakan *Fix Effect Model*

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 01/17/19 Time: 20:52

Sample: 2010 2016

Periods included: 7

Cross-sections included: 7

Total panel (balanced) observations: 49

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	31.39468	5.317335	5.904213	0.0000
LagX1	6.661513	0.943423	7.061004	0.0000
LagX2	0.134429	0.815694	5.164803	0.0187
LagX3	0.174543	0.613715	5.284405	0.0177

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.904743	Mean dependent var	65.84776
Adjusted R-squared	0.882760	S.D. dependent var	3.153729
S.E. of regression	1.079845	Akaike info criterion	3.171417
Sum squared resid	45.47654	Schwarz criterion	3.557502
Log likelihood	-67.69971	Hannan-Quinn criter.	3.317897
F-statistic	41.15758	Durbin-Watson stat	2.133737
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 3

Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	54.342501	(6,39)	0.0000
Cross-section Chi-square	109.587834	6	0.0000

UjiHausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	13.786974	3	0.0028

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
LagX1	6.661513	6.550353	0.003317	0.0536
LagX2	0.134429	0.061117	0.004034	0.2484
LagX3	-0.174543	-0.111903	0.007338	0.4646

Lampiran 4. Hasil Uji Asumsi Klasik

1. UJI HETEROSKEDASTISITAS

Dependent Variable: RESABS

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 01/17/19 Time: 20:57

Sample: 2010 2016

Periods included: 7

Cross-sections included: 7

Total panel (balanced) observations: 49

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.260936	6.364859	-0.198109	0.8439
LagX1	-0.847496	1.171408	-0.723486	0.4731
LagX2	-0.032467	1.005491	-0.032290	0.9744
LagX3	1.568323	0.725641	1.161292	0.1360

Effects Specification

	S.D.	Rho
Cross-section random	1.457113	0.5357
Idiosyncratic random	1.356567	0.4643

Weighted Statistics

R-squared	0.098525	Mean dependent var	0.792465
Adjusted R-squared	0.038427	S.D. dependent var	1.348806
S.E. of regression	1.322637	Sum squared resid	78.72163
F-statistic	1.639395	Durbin-Watson stat	1.312486
Prob(F-statistic)	0.193612		

Unweighted Statistics

R-squared	0.085701	Mean dependent var	2.387428
Sum squared resid	133.8415	Durbin-Watson stat	0.771965

2. UJI MULTIKOLINEARITAS

	LOGX1	LOGX2	LOGX3
LagX1	1.000000	0.592105	0.432805
LagX2	0.592105	1.000000	0.207773
LagX3	0.432805	0.207773	1.000000

3. UJI NORMALITAS

